



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK Sekolah
Menengah
Kejuruan
Dari
Masa
ke Masa



SMK Dari Masa ke Masa

Pelindung

Hamid Muhammad, Ph.D
(Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah)

Penanggung Jawab

Drs. M. Mustaghfirin amin, MBA
(Direktur Pembinaan SMK)

Ketua Tim Penulis

Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak

Pengarah Materi

Ir. Sri Pudji Lestari, MM
Dr. Ir. M. Bakrun, MM
Moehammad Soleh, S.P
Ir. Nur Widyani, MM

Kontributor

Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak
Chrismi Widjajanti, SE., MBA
Arfah Laidiah Razik, SH., M.A
Harry Suliswanto, MM
Ir. Bagiono Djokosumbogo
Anwar Chatib

Editor

Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak
Tri Haryani, S.Pd

Sekretariat

Andi Amrullah, SE., MBA | Siman, SE | Herdiana, ST
Pipin Dwi Nugraheni, SE | Tri Haryani | Yana, S.Pd

Kuangan

Asep Edi, S.Pd

Diterbitkan Oleh

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya akhirnya terbitlah Buku “SMK Sekolah Mengengah Kejuruan Dari Masa Ke Masa” untuk melengkapi buku terbitan sebelumnya yang berjudul “Sejarah Pendidikan Teknik Dan Kejuruan Di Indonesia”. Edisi ini berisi gambar-gambar yang lebih menceritakan keadaan dari situasi pendidikan di Indonesia dari masa ke masa.

Tentunya dengan adanya buku ini diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana perkembangan pendidikan menengah kejuruan di Indonesia dari zaman ke zaman. Dengan memahami konteks *zeitgeist* (semangat zamannya) dan melihat pendidikan menengah kejuruan secara historis, kita dapat melihat perkembangan-perkembangan kebijakan dan program pendidikan kejuruan pada masa tertentu. Tentunya ini menjadi bahan pembelajaran untuk kita, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan menengah kejuruan dimasa yang akan datang. Dari buku ini kita bisa melihat potret pendidikan menengah kejuruan di Indonesia pada zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, Pelita I , Pelita II, Pelita III, Pelita IV, Pelita V, Pelita VI, sampai saat ini. Ditambah dengan cita-cita SMK yang ingin mempersiapkan lulusannya agar siap untuk berkiprah di dunia usaha dan industri.

Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mengupayakan buku ini terbit sesuai dengan rencana. Kami berharap buku ini dapat memberikan masukan yang bermakna bagi mewujudkan pendidikan Nasional yang mampu mendorong kemajuan Bangsa Indonesia, dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Desember 2015
 Direktur Pembinaan SMK



Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
 NIP 1958 0625 1985031003



DAFTAR ISI



BAB 1

SEJARAH PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA

Pendidikan Menengah Kejuruan
Pada Zaman Belanda 11

PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA ZAMAN JEPANG

Pendidikan Menengah Kejuruan
Pada Zaman Jepang 19

Pendidikan Kejuruan Teknik 22

PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA ZAMAN PELITA

Perkembangan Pendidikan
Kejuruan Pada Pelita I dan II 27

Pengembangan Pendidikan
Teknik dan Kejuruan 32

Perkembangan Pendidikan
Kejuruan Pada Pelita III 36

Strategi Pendidikan
Kejuruan Pada Pelita III 46

Perkembangan Pendidikan
Kejuruan Pada Pelita IV 67

Pendidikan Kejuruan Pelita
IV 70

Perkembangan Pendidikan
Menengah Kejuruan Pada
Pelita V 75

Program-program Yang Telah
Dicanangkan Pada Pelita V 77

Perkembangan Pendidikan
Kejuruan Pada Pelita VI 83

Permasalahan Pendidikan
Kejuruan Pada Pelita VI 87





BAB 2

PROFIL PEMBANGUNAN SMK KEBIJAKAN DAN PROGRAM UTAMA PADA MASANYA

Drs. Soenaryo, M.Sc. (1971-1979)	92
Ir. Hadiwatama, M.Sc.Eng. (1979-1983)	94
Prof. Dr. A.O.B. Situmorang (1983-1987)	96
Drs. Suradjiman (1987-1988)	98
Prof. Dr. Benny Suprpto Brotosiswoyo (1988-1992)	100
Drs. Jorlin Pakpahan (1992-1998)	102
Dr. Ir. Gatot Priowirjanto (1998-2005)	104
Dr. Joko Sutrisno (2005-2012)	106
Ir. Anang Tjahjono M.T. (2012-2013)	108
Drs. M. Mustaghfirin Amin, M.B.A (2013-Sekarang)	110



BAB 3

PERSIAPAN SMK MENUJU 2020

Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020	113
Rencana Strategis Menuju 2020	117
Fokus Pengembangan SMK Menuju 2020	141

LAMPIRAN

Salinan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	178
--	-----

DAFTAR PUSTAKA

188



BAB 1

SEJARAH PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA



Kelompok potret siswa Raja William III sekolah Weltevreden, tahun ajaran 1919-1920

Foto : <http://www.tropenmuseum.nl>

Pendidikan adalah usaha sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh suatu badan dengan tujuan tertentu. Badan itu bisa pemerintah, swasta, dan golongan agama. Tujuannya tergantung pada pihak yang menyelenggarakannya. Bila penyelenggaraannya adalah pihak agama, maka tujuannya utamanya adalah untuk menanamkan nilai-nilai agama, maka tujuan utamanya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan menambah pengetahuan tentang agama.

Bila pemerintah yang menyelenggarakannya, maka tujuan utamanya sangat bervariasi karena tugas pemerintah itu sangat luas. Karena itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada warga negara secara luas. Dalam hal ini, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka lahirlah pendidikan umum.



Zeevaart School Soerabaja
Foto : Perpustakaan Nasional RI

Akan tetapi karena pemerintah juga bertanggung jawab terhadap lancarnya pemerintahan, maka lahirlah pendidikan khusus untuk menyiapkan calon pegawai pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab juga terhadap perekonomian, sehingga lahirlah pendidikan di bidang ekonomi dan perdagangan. Sebagai warisan dari zaman terdahulu, lahirlah pendidikan yang mengutamakan ilmu dan pengetahuan. Karena diperlukan tenaga terampil untuk menjalankan berbagai peralatan dalam teknologi yang maju, diperlukan tenaga teknik. Maka lahirlah pendidikan teknik mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi di perguruan tinggi.



Zeevaart Technische School
Foto : Perpustakaan Nasional RI

Umumnya pendidikan erat terkait dengan peradaban (*civilization*). Peradaban menyangkut isi hati, pemikiran, gagasan, perasaan, perilaku, kebiasaan, kemampuan, ketrampilan suatu bangsa yang dicapainya dalam agama, moralitas, intelektualitas, ilmu pengetahuan, kesenian, ekonomi, sosial dan politik pada waktu tertentu yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan pelajaran, pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan harga diri bangsa. Pendidikan lahir dari peradaban, sebaliknya peradaban tumbuh berkat pendidikan; jadi keduanya bersifat timbal balik.

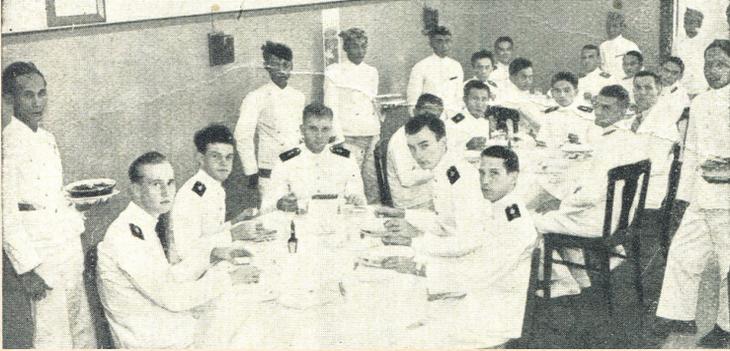


Bus sekolah dengan siswa dari pekebun Schoolvereniging
'Pengalengan' di Bandung

Foto : <http://www.tropenmuseum.nl>

Dalam makna mutu kebudayaan, digunakan istilah pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan harga diri bangsa sebagai bangsa yang beradab. Maka di masa lalu, nama kementerian yang menangani urusan urusan pendidikan dan kebudayaan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan tertentu pada siswa sehingga dengan keterampilan yang dimilikinya, para siswa kelak sebagai warga negara akan turut mengambil bagian untuk meningkatkan harga diri dan martabat bangsa sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab. Di zaman yang lampau, justru falsafah pendidikan dalam aspek ajaran moralnya jauh lebih menonjol daripada aspek kejuruannya. Pendidikan kejuruan sebagai suatu sistem, sesungguhnya baru dikembangkan sungguh-sungguh sejak perang dunia II.





Zeevaart Technische School
Foto : Perpustakaan Nasional RI

PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN PADA ZAMAN BELANDA

Pada Zaman Belanda sudah terdapat beberapa model sekolah yang dikembangkan oleh kolonial Belanda di Indosedia. Sekolah yang dibuat pihak Belanda memiliki beberapa corak, yaitu terdiri dari corak kewanitaan, sekolah teknik, sekolah pertanian.

1. Kelompok Sekolah Bercorak Kewanitaan

Sekolah-sekolah bercorak kewanitaan pada zaman Belanda :
Jenis pendidikan *Nijverheids Onderwijs* pada tingkat SLTP adalah *Lagere Nijverheids School*.

- Ada dua pendidikan keputrian, yaitu pada tingkat sekolah rakyat terdapat Sekolah Kartini dan pada tingkat SLTP adalah pendidikan Keputrian.
- Terdapat juga Sekolah Keutamaan Istri.
- *Gouvernements Opleiding School voor Vakonderwijzeressen (OSVO)* dengan lama pendidikan 4 tahun. Sekolah ini memberikan pelajaran kerumahtanggaan selama dua tahun, kemudian siswa dapat mengikuti suatu kejuruan tertentu yang lamanya satu atau dua tahun,

misalnya untuk bagian menjahit, menghias kain dan *muttige handwerken*. OSVO adalah sekolah kewanitaan tingkat SLTP.

- *Gouvernements Lagere Nijverheids School (LNS)* yang menerima siswa dari sekolah berbahasa Belanda (HIS). LNS adalah sekolah kewanitaan tingkat SLTP.
- *Mevrouw de Jonge School* yang menerima siswa dari sekolah berbahasa Indonesia (*Meisje Vervolg School*). Tingkat dan isi mata pelajaran sekolah ini sama dengan LNS.
- *Meisje Vervolg School* yang memberikan pelajaran tentang dasar-dasar kewanitaan.
- *Kop School* yang merupakan sekolah lanjutan *Meisje Vervolg School* atau merupakan *Vervolg School kelas II*.
- *Van Deventer School* adalah sekolah guru untuk keterampilan keputrian.

2. Kelompok Sekolah Teknik



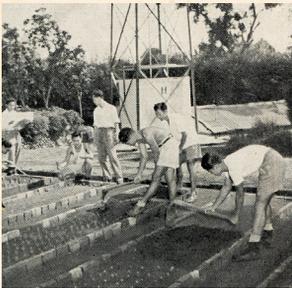
Kweek School Makassar
Foto : Perpustakaan Nasional RI

Sekolah teknik pada zaman Belanda terdiri atas:

- *Ambachts School van Soerabaia* adalah sekolah teknik malam hari untuk anak-anak Indo dan Belanda yang bekerja siang hari, berdiri sejak tahun 1853 di Surabaya.
- *Burger Avond School*, lamanya 2 tahun, merupakan sekolah pertukangan yang digabungkan dengan *Hoogere Burger School* (HBS sama dengan sekolah menengah umum), berdiri pada tahun 1876. Pada tahun 1885 *Burger Avond School* mulai dipisahkan dari HBS. Lama pendidikan sekolah ini diubah dari 2 tahun menjadi 4 tahun, dan mata pelajarannya diperluas menjadi sekolah teknik.
- *Europeese Ambacht School*, lama pendidikannya 3 tahun dan merupakan sekolah teknik bagi bangsa Eropa dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda, berdiri sejak 1900.
- *Koningin Weihelmina School (KWS)*, berdiri pada tahun 1901, lama pendidikannya 3 tahun, memiliki KWS-B yang berdiri sendiri pada tahun 1911 dengan jurusan mesin, bangunan sipil, dan pertambangan. Pada tahun 1913 KWS 3 tahun ditingkatkan menjadi 4 tahun, kemudian pada tahun 1921 jurusan bangunan sipil KWS 4 tahun dipisahkan menjadi bangunan sipil dan bangunan air, dan tahun 1926 KWS 4 tahun jurusan mesin dipisahkan menjadi jurusan mesin khusus dan listrik.
- *Koningin Emma School (KES)* dengan lama pendidikan 4 tahun merupakan penjelmaan dari *Burger Avond School* di Surabaya. Sekolah ini dilaksanakan pada siang hari dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah ini didirikan sejak tahun 1912. Pada tahun 1932 lama pendidikan KWS Jakarta dan KES Surabaya menjadi 5 tahun.
- *Middelbare Technise School* (Sekolah Teknik Menengah).

3. Kelompok Sekolah Pertanian

- Pada tahun 1903 didirikan Sekolah Pertanian (*Landbow School*) yang menerima lulusan SR yang berbahasa Belanda.
- Pada tahun 1911 didirikan Sekolah Pertanian (*Cultuur School*) yang terdiri atas dua jurusan, yaitu pertanian dan kehutanan. Lama belajar 3-4 tahun, bertujuan mendidik siswanya menjadi pengawas.
- Pada tahun 1911 didirikan Sekolah Pertanian Menengah (*Middelbare Landbouw School*) yang menerima lulusan MULO atau HBS 3 tahun, lama pendidikannya 3 tahun.
- Pada tahun 1920 didirikan Sekolah Tani (*Landbouw Bedriff School*) yang menerima lulusan sekolah rakyat 5 tahun. Lama pendidikannya 2 tahun, dan digunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.



4. Kelompok Sekolah Perdagangan

- Pada tahun 1906 berdiri *Koningin Wilhelmina School* yang memiliki jurusan A (KWS A), sastra dan ekonomi.
- Pada tahun 1911 jurusan sastra/ekonomi berdiri sendiri dan diberi nama *Print Hendrik School (PHS)*, bertujuan mendidik Bumi putera untuk menjadi pengawas (*Opzichter*).
- Pada tahun 1935 didirikan *Middelbare Handel School* (Sekolah Dagang Menengah) dengan lama pendidikan 3 tahun, menerima lulusan dari MULO.



PENDIDIKAN DI INDONESIA DARI ZAMAN JEPANG HINGGA SEBELUM PELITA



Pada tahun 1940-an, Jepang (sesungguhnya lebih tepat dikatakan balatentara Jepang) mengumbar cita-cita untuk menjadi saudara tua diseluruh daerah Asia Timur. Untuk itu, Jepang membentuk tentara yang kuat. Pada tahun 1942 Jepang meluncurkan *blitzkrieg* (serangan kilat) ke Korea, Tiongkok dan Asia Tenggara dengan armada yang kuat sehingga dalam waktu singkat, seluruh daerah itu diduduki. Serangan kilat atau mendadak (tanpa pemberitahuan) mula-mula dilancarkan terhadap *Pearl Harbour* di Hawaii untuk melumpuhkan kekuatan Amerika di Pasifik. Serangan mendadak ini berhasil.

Setelah menduduki Indonesia pada tahun 1942, usaha pertama tentara Jepang adalah membenahi pemerintahan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan (*lingua franca*). Penggunaan bahasa Indonesia ini yang secara umum terjadi untuk pertama kali, turut mengorbankan rasa kebangsaan orang Indonesia pada waktu itu. Rasa kebangsaan ini sesungguhnya telah mulai tumbuh sejak zaman Belanda, namun pada zaman Jepang rasa kebangsaan Indonesia mendapat dorongan yang semakin kuat. Dalam hal ini, pendudukan Jepang dapat dilihat sebagai persiapan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.



Sekolah Kepunjaan R.A. Dewi Sartikah, Bandung
Foto : Perpustakaan Nasional RI



Akan tetapi kehidupan rakyat Indonesia benar-benar sengsara. Pada saat itu, misalnya, beras dijajah. Distribusi beras seluruhnya berada di tangan pemerintahan Jepang. Pembagian beras untuk orang Indonesia dibatasi seketat mungkin agar sisanya dapat diangkut untuk menghidupi tentara Jepang yang sedang berperang melawan Tentara Sekutu (khususnya Amerika). Kelaparan banyak terjadi, khususnya dikalangan orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Mereka harus membeli beras di pasar gelap yang merajalela.

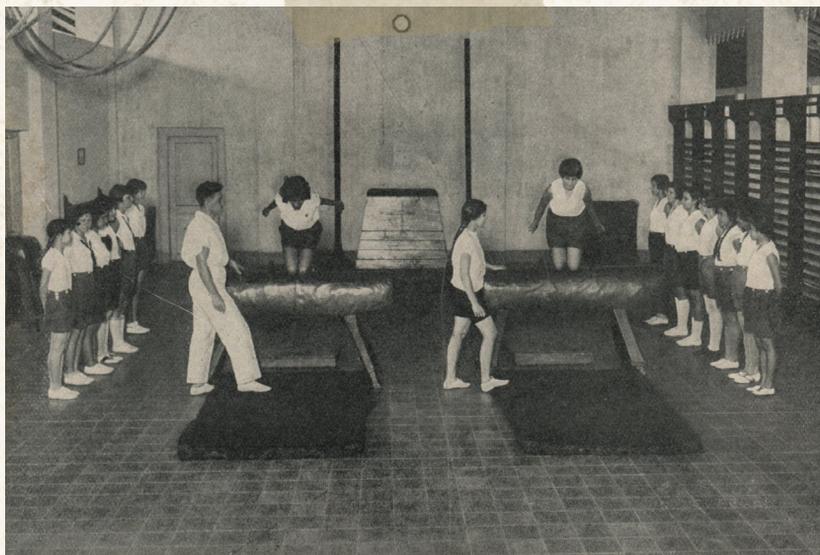
Pada masa itulah lahir istilah “catut” yang artinya berjualan secara gelap. Rakyat menjual apa pun yang bisa dijual di pasar gelap untuk dapat menyambung hidup ala kadarnya. Tidak ada barang import waktu itu, sehingga perdagangan dalam arti normal tidak terjadi. Untunglah penduduk Jepang tidak berlangsung lama, yaitu hanya 3,5 tahun, sesuai dengan ramalan joyoboyo yang secara simbolis menyebut masa “seumur jagung”. (Umur tanaman jagung adalah 3,5 bulan). Pada masa pendudukan Jepang telah terjadi perubahan dalam pendidikan. Pihak Jepang membuka sekolah berdasarkan model pendidikan Jepang.



PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN PADA ZAMAN JEPANG

Sejak bala tentara Jepang datang, sekolah-sekolah yang sempat ditutup karena situasi perang segera dibuka kembali. Tiga tingkat pendidikan yaitu dasar, menengah dan tinggi tetap berlaku. Pendidikan dasar terdapat di Sekolah Rakyat yang lamanya 6 tahun dan usia masuk adalah 6 tahun. Pendidikan tidak dibedakan antara untuk golongan ningrat dan rakyat biasa. Hal ini dapat dianggap sebagai perubahan yang penting pada masa pendudukan Jepang; sesuatu yang telah berlaku lama pada zaman Belanda. Pendidikan menengah terdiri atas 3 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 3 tahun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Perguruan tinggi yang dibuka kembali adalah Sekolah Tinggi Kedokteran di Salemba, Jakarta, dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Pada zaman Jepang, nama Batavia mulai berubah menjadi Jakarta.

Meskipun sekolah-sekolah diaktifkan kembali, jumlahnya jauh menurun bila dibandingkan dengan zaman Belanda. Sekolah Rakyat yang dibuka kembali hanya sekitar 13.500 atau 62,8% dari yang ada dari zaman pemerintahan Belanda yang berjumlah 21.500. sekolah menengah yang dibuka hanya 20 buah atau 2,4% dari 850 sekolah pada zaman Belanda. Dapat dibayangkan bahwa pada masa pendudukan Jepang, banyak guru yang kehilangan pekerjaannya dan banyak pula siswa yang terpaksa putus sekolah (*drop-out*).



Koning Willem III School
Foto : Perpustakaan Nasional RI

Pendidikan pada waktu itu bertujuan untuk menanamkan kesadaran sebagai anggota suatu lingkungan yang dinamakan “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” dibawah lindungan Jepang. Untuk itu setiap pagi diadakan upacara pagi dengan proses : (1) guru dan murid berkumpul dihalaman sekolah; (2) bendera Jepang dinaikan disertai pemberian hormat pada bendera (angkat tangan ke kepala) layaknya tentara; (3) memberi homat kepada kaisar jepang, Tenno Heika (membungkuk melakukan sai keirei); (4) menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo; (5) bersumpah untuk setia kepada cita-cita Dai-Toa – Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya; dan (6) melakukan senam pagi a la Jepang, dikenal dengan taiso.



SGB Kristen Djakarta

Foto : Perpustakaan Nasional RI

Bahasa Jepang menjadi bagian wajib dalam kurikulum di samping bahasa Indonesia, sementara bahasa Belanda dilarang untuk digunakan dalam keadaan apapun termasuk di sekolah. Latihan militer merupakan bagian dari kurikulum wajib. Lagu-lagu Jepang, khususnya lagu-lagu ketentaraan, diajarkan di semua sekolah. Siswa sering dikerahkan untuk melakukan kerja bakti (kinro hosyi) seperti membersihkan pasar, gedung-gedung pemerintah, jalan-jalan, dan sebagainya. Guru-guru diberi kursus kilat untuk menguasai bahasa Jepang. Kebudayaan dan sejarah Jepang merupakan bagian utama dari kursus ini, disamping topik seperti geopolitik untuk menekankan lingkungan Asia Timur Raya dari Gagasan Jepang untuk menguasai daerah itu. Dapat dikatakan bahwa pendidikan menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita balatentara Jepang.



Ambacht School Kepunjaan Missie
Foto : Perpustakaan Nasional RI

PENDIDIKAN KEJURUAN TEKNIK

Pada zaman Jepang, sempat dibuka kembali Sekolah Pertukangan (*Ambachts School dan Ambachts Leergang*) di samping Sekolah Teknik Menengah (STM). Sebuah STM dibuka oleh Balaikota Bandung (Bandung Sichoo) bertempat di STM Ciroyom sekarang. Pada zaman Belanda, Balaikota Bandung menyelenggarakan kursus teknik di Coroyom. Sekolah yang dibuka pada zaman Jepang ini lamanya 3 tahun dan sempat mempunyai siswa sebanyak 360 orang. Jurusan yang dibuka adalah mesin, listrik dan bangunan.

Pada zaman Jepang inilah para guru harus menemukan kata-kata teknik dalam bahasa Indonesia yang selama ini menggunakan bahasa Belanda. Dalam hal ini, seorang yang bernama Anwir (pegawai PJKA), lulusan KWS Jakarta, banyak berjasa dalam mengalihbahasakan istilah-istilah teknik Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata *zuiger* dalam bahasa Belanda, dibuat padanan katanya dalam bahasa Indonesia yaitu “torak”. Tapi sesungguhnya torak adalah alat tenun yang menarik benang bolak-balik dari kanan ke kiri. Karena *zuiger* juga bergerak bolak-balik dari atas ke bawah, maka terjemahannya cukup mendekati. Namun waktu istilah itu digunakan pertama kali digunakan, terasa ada kejanggalan.

Itulah salah satu contoh dari apa yang dikemukakan pada bagian awal bab ini bahwa dengan runtuhnya pemerintahan Belanda, runtuh pula sistem pendidikannya karena pada zaman Jepang, bahasa Belanda dilarang. Indonesia pun harus membangun sistem pendidikannya kembali mulai dari nol. Orang Belanda memang masih banyak yang tinggal di Indonesia, tetapi mereka tidak ikut dalam proses peralihan ini. Orang Indonesia yang menjadi guru teknik tidak memperoleh persiapan yang memadai.

Kelompok Sekolah bercorak Kewanitaan

- Pada zaman Jepang, LNS dan Mevrow de Jonge School di gabung dan diubah menjadi Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dengan lama pendidikan tiga tahun.
- OSVO diubah menjadi Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) dengan lama pendidikan tiga setengah tahun.
- Pada beberapa SKP terdapat bagian Frobel (Taman Kanak-kanak) yang lama pendidikannya dua tahun, sebagai kelanjutan dari SKP tiga tahun bagi siswa yang ingin menjadi guru Taman Kanak-kanak.
- Pada sekolah guru Taman Kanak-kanak, mata pelajaran kewanitaan dianggap penting. Oleh Karena itu, pada tahun pertama dan kedua diberikan pelajaran kewanitaan.



Sekolah Kepunjaan R.A. Dewi Sartikah, Bandung

Foto : Perpustakaan Nasional RI

Kelompok Sekolah Teknik

- Pada Zaman Jepang, *Middelbare Technise School* yang ada pada zaman Belanda disebut Sekolah Teknik Menengah dan merupakan embrio STM.
- Sekolah Pertukangan (*kogyo Gakko*).
- Sekolah Teknik Menengah (*kogyo Semmon Gakko*).
- Sekolah Pelayaran
- Sekolah Pelayaran Tinggi

Kelompok Sekolah Pertanian

Sekolah Pertanian (*Nogyo Gakko*), lama pendidikannya 3 tahun, sesudah sekolah rakyat.



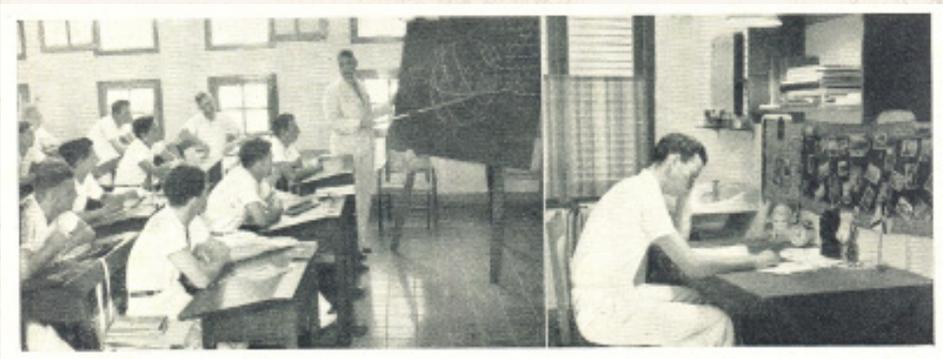


PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA ZAMA PELITA

Pada zaman Belanda pendidikan teknik dan kejuruan tidak sepenuhnya diabaikan. Seperti halnya dengan sistem umum, pendidikan tehnik dan kejuruan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang pertama-tama dirasakan oleh masyarakat Eropa. Kekurangan akan tenaga insinyur dan juru tehnik yang terampil mendorong pemerintahan Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah tehnik dan kejuruan di Pulau Jawa menjelang pergantian abad ke 19. Beberapa sekolah tehnik didirikan selama dua dasawarsa pertama abad ke-20. Akhirnya, sebuah sekolah tinggi tehnik (*Technische Hogeschool*) atau *engineering college* didirikan di Bandung pada tahun 1919, sekarang ITB, terutama disebabkan oleh adanya kekurangan insiyur dari Delft, Negara Belanda, yang merupakan sumber utama pendidikan tinggi tehnik di negeri itu. Putra putri Indonesia tidak dilarang memasuki pendidikan tinggi tehnik dan kejuruan tersebut, namun sangat sedikit yang memilih untuk memasuki pendidikan tehnik dan kejuruan atau tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Lebih dari itu, pendidikan tehnik dan kejuruan mensyaratkan hal yang sama dengan gaya pendidikan Belanda yang ketat (*Dutch style*), seperti halnya dengan pendidikan akademik pada SLTP dan SLTA Belanda.

Perkembangan Pendidikan Kejuruan Pada Pelita I dan II

Orang-orang di Indonesia pada waktu itu memandang bahwa pendidikan dasar Eropa yang baik merupakan suatu prestise sekaligus simbol bagi orang terdidik dan berbudi. Pendidikan model Eropa memudahkan orang dalam mencari pekerjaan yang lebih menarik dan menguntungkan dibandingkan dengan menjadi tenaga kerja kasar. Orang-orang Indonesia dengan pendidikan formal, dengan beberapa kekecualian, memandang dirinya dan juga dipandang oleh majikan-majikanya memiliki potensi untuk dilatih dan dipekerjakan pada pemerintahan Belanda pada waktu itu.



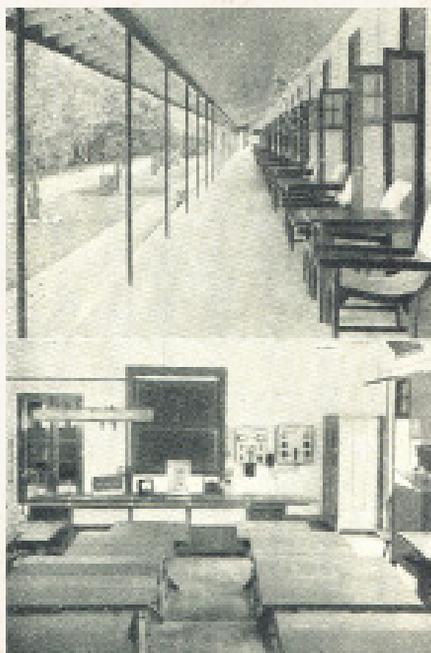
Zeevaart Technische School
Foto : Perpustakaan Nasional RI



SGB Kristen Djakarta
Foto : Perpustakaan Nasional RI

Pemerintah pendudukan Jepang selama periode 1942-1945 melakukan sedikit perubahan terhadap situasi tersebut. Selain lebih terbuka kesempatan bagi elit Indonesia untuk maju dengan cepat guna mencapai posisi puncak pegawai sipil, pada batas-batas tertentu, juga mereka dapat mencapai posisi manajerial pada perusahaan-perusahaan komersial. Namun persediaan akan tenaga kerja yang terlatih tinggi sebenarnya menurun pada waktu itu.

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Dr. Mohammad Hatta, wakil Presiden R.I, melakukan survei situasi dan menemukan bahwa dari peluang sekitar 600 ahli hukum yang diperlukan hanya tersedia kurang lebih 100 orang, dan bagi 1600 dokter yang dibutuhkan hanya tersedia kurang lebih 800 orang. Pemenuhan kebutuhan tenaga ahli juga dirasakan lebih parah dalam bidang rekayasa, yaitu tenaga-tenaga insinyur. Sjafruddin Prawiranger ditugaskan untuk menyediakan tenaga pegawai sipil terlatih untuk pemerintah, namun hanya sedikit yang bisa dilakukan sebelum pemerintahan RI dipaksa pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan perjuangan. Meskipun demikian perjuangan tidak mematahkan semangat untuk memecahkan masalah tenaga kerja tingkat tinggi. Suatu universitas baru didirikan di istana Sultan Yogyakarta yang diberi nama Universitas Gadjah Mada (UGM).



Zeevaart Technische School
Foto : Perpustakaan Nasional RI



Sejak awal kemerdekaan, pemerintah RI menunjukkan dengan jelas kesadaran akan besarnya masalah pengembangan tenaga terlatih dan berusaha mencari solusinya melalui pendidikan. Namun cara yang ditempuh sebagian besar merupakan perluasan dari lembaga pendidikan zaman Belanda. Sistem pendidikan formal diperluas sepanjang anggaran memungkinkan, dengan hanya sedikit perubahan pada organisasi dan kurikulum. Pengembangan SDM meliputi banyak hal pokok dan unsur-unsur terkait. Hal ini mencakup pendidikan formal pada semua tingkat. Selain itu juga mencakup pelatihan ditempat kerja atau industri, pengembangan diri, pendidik orang dewasa, dan sebagainya.

Strategi pengembangan sumber daya manusia memerlukan integritas dari program-program yang luas berdasarkan berbagai studi yang luas pula. Investasi dalam pendidikan sudah tentu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sebaiknya pertumbuhan ekonomi akan memungkinkan adanya investasi dalam pengembangan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan adalah benih dan bunga dari pengembangan ekonomi. Suatu studi tentang pendidikan, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perbandingan pendaftaran pelajar dan mahasiswa disemua tingkat pendidikan dan GNP per kapita, namun faktor-faktor lainnya juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu reformasi pendidikan adalah strategik seperti halnya peningkatan investasi dalam pendidikan untuk peningkatan pengembangan ekonomi dan sosial.

Kunci dari strategi pengembangan SDM yang efektif adalah adanya kesinambungan dari berbagai program pokok. Keseimbangan yang tepat antara kuantitas dan kualitas pada pendidikan di semua tingkat harus dipecahkan dengan baik, relevan dan tepat, karena kuantitas dan kualitas sulit ditingkatkan pada waktu yang sama dan dengan tingkat kecepatan yang sama. Analisis dari berbagai kebijakan alternatif SDM merupakan hal yang penting dalam rencana pengembangan ekonomi yang baik.





Pengembangan Pendidikan Teknik dan Kejuruan

Pendidikan Teknik dan Kejuruan sudah ada di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, dengan tujuan utama memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan bagi kehidupan orang dewasa. Pada waktu itu belum diperkirakan pengetahuan dan tingkat keterampilan yang akan menunjang pada pembangunan nasional.

Sebelum Pelita I dimulai pada tahun 1969, telah ada 126 Sekolah Teknik Menengah (STM) di samping 565 Sekolah Teknik (ST) dengan tujuan memberikan pelatihan teknik, namun tujuan pendidikan tidak ditetapkan secara jelas sehingga tidak sesuai dengan kesempatan kerja bagi para lulusannya. Kebanyakan guru, orang tua dan siswa memandang STM sebagai sebagai batu loncatan untuk pendidikan yang lebih tinggi, bukan untuk persiapan memasuki dunia kerja yang memerlukan keterampilan teknik dan kejuruan. Pada waktu itu banyak sekolah yang

merupakan duplikasi yang tidak perlu, sehingga banyak lulusan yang sulit mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pendekatan pengajarannya pun cenderung teoritis dan kurang mengandung muatan keterampilan yang diinginkan oleh dunia kerja.

Keadaan yang sama juga dihadapi oleh pendidikan kejuruan lainnya. Pada saat itu, telah tersedia 224 Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), 389 Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), 47 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), dan 201 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP). Sekolah-sekolah ini mempunyai masalah yang sama yaitu para lulusan tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Pada saat itu, ditetapkan tujuan dan prioritas pendidikan menengah kejuruan antara lain sebagai berikut:



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan



- Tujuan utama pendidikan teknik dan kejuruan adalah menghasilkan lulusan dengan pendidikan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan membekali para siswa dengan rasa kebanggaan nasional dan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- Mengembangkan sistem pendidikan teknik dan kejuruan yang efisien dan efektif serta relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
- Mengembangkan kesempatan kerja dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktik kepada para lulusan.
- Menghasilkan sumber daya manusia yang secara kuantitatif maupun kualitatif mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan nasional.
- Perioritas program diletakan pada menyiapkan lulusan pendidikan teknik dan kejuruan untuk memasuki dunia industri, pertanian, bisnis dan perdagangan, industri rumah tangga, serta seni dan budaya.
- Dalam rencana pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan untuk Pelita I (1967-1974) yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pembangunan nasional, dipelajari dan dianalisisi kekurangan-kekurangan pada sistem sebelumnya dan diambil langkah-langak untuk mengatasinya. Dalam upaya untuk memperbarui sistem pendidikan teknik dan kejuruan secara keseluruhan, maka sistem pendidikan ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Landasan pengembangan adalah: (1) menciptakan keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja untuk perluasan industri; (2) aspirasi pendidikan masyarakat; dan (3) kemampuan yang diperlukan untuk pembangunan dalam pengertian luas yang meliputi keterampilan, kecerdasan, dan sikap yang sehat untuk bekerja.

Selanjutnya, pada Pelita II (1974-1979), strategi pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan antara lain adalah: (1) pengembangan kesempatan kerja; (2) pengembangan industri khususnya yang mendukung produk pertanian dan persiapan untuk pertumbuhan industri di masa depan; (3) perbaikan sektor sosial dan pendidikan masyarakat; dan (4) penyeimbangan antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Selama periode ini, kekurangan akan tenaga kerja teknik yang terlatih dengan baik, khususnya pada tingkat teknisi dan tenaga kerja terampil, merupakan hambatan yang serius terhadap program industrialisasi nasional. Oleh karena itu, pada Pelita II prioritas diletakkan pada upaya untuk melanjutkan pengembangan dan perbaikan pendidikan teknik dan kejuruan serta fasilitas pelatihan agar mampu mendukung pembangunan ekonomi.





Perkembangan Pendidikan Kejuruan Pada Pelita III

Pelita III merupakan periode yang digunakan oleh pemerintah untuk mulai meletakkan dasar-dasar guna memasuki tahap industrialisasi. Prioritas pembangunan pada saat itu diletakkan pada pendidikan dasar dan pendidikan kejuruan teknik pada semua tingkatan. Unsur penting lainnya yang menjadi perhatian khusus adalah masalah guru pendidikan kejuruan yang saat itu baru mencapai 12.750 orang, termasuk di dalamnya 3.750 orang yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga jumlah guru yang efektif hanya 9.000 orang. Padahal kebutuhan riil akan guru pada saat itu sebanyak 24.000 orang. Hal ini berarti jumlah guru yang tersedia hanya 37% dari kebutuhan.

Dari 3.750 orang guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya, masih dapat difungsikan sebanyak 2.000 orang guru melalui program penataran penyesuaian. Sampai dengan tahun 1979/1980, baru sekitar 4.000 orang guru yang efektif pernah mengikuti program penataran. Diperkirakan terdapat sekitar 1.000 orang guru yang melakukan pengembangan dengan usaha sendiri (self-development). Jadi jumlah kekurangan guru masih 13.500 orang. Pada waktu itu juga diidentifikasi bahwa pengadaan, pengangkatan, penempatan, peningkatan mutu dan pembinaan karier guru belum terpadu dalam satu sistem. Jadi, disamping masalah jumlah guru kejuruan yang masih kurang, terdapat masalah - masalah yang lebih mendasar berkenaan dengan guru kejuruan, antara lain dapat dikemukakan berikut ini:



Middelbare Landbouw School
Foto : Perpustakaan Nasional RI

Pertama, profesi guru kejuruan pada saat itu kurang menarik, sehingga terdapat kecenderungan perpindahan guru - guru kejuruan yang bermutu baik ke dunia usaha dan industri. Keadaan seperti itu terutama disebabkan gaji guru kejuruan relatif jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pendapatan apabila mereka menjadi tenaga profesi kejuruan di dunia usaha atau di dunia industri.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan



Foto : Djonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

Disamping itu prospek karier guru kurang cerah, begitu juga dengan penghargaan atau status sosial guru di tengah masyarakat belum memadai. Keadaan ini merupakan hambatan utama dalam melakukan pembinaan dan peningkatan mutu guru kejuruan. Keadaan ideal yang diharapkan ialah guru kejuruan seyogianya bersumber dari tenaga profesional yang berkeahlian tinggi di industri atau perusahaan yang diberi tambahan pendidikan tentang bagaimana mengajar dengan baik atau ilmu keguruan.

Kedua, program pendidikan untuk guru kejuruan yang ada saat itu belum sepenuhnya berorientasi kepada penyediaan tenaga guru kejuruan yang profesional. Di samping mutu yang rendah dan sikap mental mereka yang kurang mendukung, juga masih banyak bidang spesialisasi guru kejuruan yang belum ada program pendidikannya di LPTK untuk memenuhi kebutuhan guru bidang spesialisasi tersebut. Status keserjanaan yang mereka peroleh setelah tamat dari LPTK sering memberikan efek sosial-pisko-kultural yang membuat mereka enggan mengajar mata pelajaran keterampilan kejuruan yang bersifat blue collar job (pekerjaan kasar). Kenyataan menunjukkan pada waktu itu bahwa menjadi guru kejuruan merupakan pelarian terakhir. Apabila seorang lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan tidak diterima untuk menjadi tenaga profesional di dunia usaha/industri, barulah mereka mau menjadi guru di sekolah kejuruan.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

Ketiga, mekanisme pengangkatan dan pembinaan karier guru kejuruan yang berlaku saat itu lebih menitikberatkan pada persyaratan administratif. Pembinaan terhadap mereka pun dilakukan oleh petugas-petugas administratif dan kurang melibatkan sekolah sebagai pemakai atau melibatkan pejabat teknis lainnya yang menguasai bidangnya. Kenyataan yang timbul dari mekanisme ini ialah banyaknya guru sekolah kejuruan yang kemampuannya tidak sesuai dengan keperluan sekolah yang bersangkutan, sementara sekolah tidak dapat berbuat apapun terhadap masalah tersebut.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah guru kejuruan dengan segala aspeknya harus segera dicarikan jalan pemecahannya secara konsepsional. Pemecahan tersebut meliputi pengadaan, peningkatan, dan pengembangan guru kejuruan, terutama diarahkan untuk mengatasi kebutuhan dalam jangka pendek dan bagaimana caranya agar kekurangan guru tersebut dapat diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Usaha pemecahan masalah tersebut tidak mudah dilaksanakan melalui LPTK yang ada, bukan saja karena masalah jumlah, tetapi juga jenis dan spesifikasi guru kejuruan yang beraneka ragam.



Pada saat itu dirumuskan sebuah konsep lintas-pintas (break through concept) berdasarkan Kepmendikbud No. 124/U/1979 tanggal 8 Juni 1979 tentang Jenjang Program Pendidikan Tinggi dan Program Akta Mengajar dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau saja konsep tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka kebutuhan guru kejuruan menurut proyeksi saat itu baru akan dapat dipenuhi dalam waktu 7 - 8 tahun. Ini pun belum memperhitungkan kebutuhan guru bagi sekolah-sekolah kejuruan swasta dan kebutuhan guru bagi pengembangan dan penambahan jumlah sekolah kejuruan di masa yang akan datang.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan



Konsep lintas-pintas tersebut mengintegrasikan—sesuai dengan pola pembaruan sistem pendidikan tenaga kependidikan – pendidikan prajabatan (pre-service training), pendidikan dalam-jabatan (in-service training), dan pengembangan karier guru. Program terpadu tersebut disusun untuk menghasilkan guru yang memiliki kualifikasi Diploma III Guru Kejuruan (DGK III) yang ditempuh dalam institusi dan di sekolah dalam waktu 6 semester, serta menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Adapun program DGK III tersebut meliputi program umum, program teori dan praktik kejuruan, dan program keguruan yang dilaksanakan di dalam institusi selama 2.464 jam setara dengan 88 SKS, dan program praktik keguruan di bawah bimbingan yang dilaksanakan di lapangan/sekolah (magang) selama 2.280 jam setara 22 SKS. Di samping itu, mahasiswa harus membuat skripsi/kolokium senilai 8 SKS. Dengan demikian, jumlah beban studi program ini sebanyak 118 SKS.

Program DGK III dilaksanakan oleh lembaga yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan bagi pelaksanaan program diploma guru kejuruan; (b) memiliki tenaga pengajar yang memenuhi persyaratan, baik dari segi jumlah maupun dari segi mutunya; dan (c) memiliki organisasi dan manajemen yang memadai.

Mengingat luas dan kompleksnya masalah pendidikan kejuruan, semua usaha pemecahan masalah tersebut hanya berhasil bila didukung oleh kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan, terutama LPTK, perguruan tinggi yang relevan. Dunia usaha dan industri, Pembina dan pengembang sekolah kejuruan, serta sekolah-sekolah kejuruan itu sendiri. Disamping itu, makin terasa pula pentingnya suatu unit kerja yang secara berkelanjutan dan konsisten memikirkan pengembangan pendidikan kejuruan. Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh dalam jangka pendek ialah meningkatkan fungsi dan peranan Lembaga Pengembangan Penataran Guru seperti PPPG Teknologi (TTUC) di Bandung dan PPPG Kejuruan (VTUC) di Jakarta menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan.



Strategi Pendidikan Kejuruan Pada Pelita III

1. Kurikulum dan Program Pendidikan

Jauh sejak awal Pelita I yang berlanjut pada Pelita-Pelita berikutnya, Indonesia telah meletakkan tekadnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan memperkuat sektor pertanian dan industri. Perkembangan yang telah dicapai dalam sektor-sektor tersebut ternyata membawa perubahan positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat yang sejalan dengan cepatnya pertumbuhan sektor-sektor industri, pertanian, dan jasa. Perkembangan ini kemudian memunculkan tantangan baru; pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata sekitar 5-7%) selama tiga Pelita I-III membutuhkan dukungan keterampilan dan pengetahuan baru yang lebih canggih untuk mempertahankan momentum pertumbuhan tersebut.

Tidak ada jalan lain, upaya yang dianggap efektif untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil harus dilakukan melalui pendidikan, khususnya pendidikan formal. Dalam kenyataan, salah satu masalah penting yang dihadapi saat itu adalah pendidikan kejuruan di Indonesia tidak atau belum mendukung perkembangan industri, sehingga pemerintah mengambil langkah menekankan pengembangan pendidikan ini untuk mendukung komitmen nasional dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat membawa implikasi pada semakin tingginya tuntutan dunia usaha dan industri terhadap tenaga kerja yang berkemampuan tinggi dalam bidangnya. Tuntutatn ini pun terus berkembang dari waktu ke waktu. Agar pendidikan menengah kejuruan tetap relevan dan bermutu, maka kurikulumnya pun perlu diperbaharui supaya dapat mengikuti perkembangan zaman, baik melalui pembaruan secara luas (dikenal dengan major curriculum reform). Pembaruan kurikulum secara luas biasanya mengikuti siklus 5-10 tahunan (misalnya perubahan dari Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1976/1977), sedangkan penyesuaian terbatas dapat dilakukan kapan saja diperlukan, terutama dalam implementasi kurikulum di sekolah.

Dalam kaitan tersebut, pengembangan Kurikulum SMK tahun 1976/1977 merupakan produk maksimal yang dapat dicapai untuk memenuhi keperluan pembangunan pada saat itu. Ciri kurikulum SMK tahun 1976/1977 adalah sebagai berikut:

- Rumusan tujuan dan orientasi pendidikannya adalah dunia kerja.
- Jumlah jam praktik ditingkatkan dari 10% menjadi 30-50% dari keseluruhan program pendidikan, yaitu dari 4 jam pelajaran menjadi 12-20 jam pelajaran per minggu.
- Berorientasi kepada siswa yaitu siswa melakukan praktik (bukan guru yang melakukan demonstrasi di hadapan siswa) dan digalakkan pula metode CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif).
- Organisasi kurikulum terdiri atas Program Umum, Teori Kejuruan, dan Praktik Kejuruan. Program Umum disbanding Program Teori dan Praktik Kejuruan sebesar 20% : 80%.



- Dokumen kurikulum terdiri atas Buku 1 (Tujuan), Buku II (GBPP) dan buku III (Petunjuk Pelaksanaan).
- Menggunakan istilah Bagian dan Jurusan.
- Menerapkan sistem semester.

Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (yaitu Kurikulum 1964), beberapa inovasi dilakukan dalam Kurikulum 1976/1977. Namun dengan makin meningkatnya penerapan teknologi khususnya penerapan teknologi baru dalam pembangunan – baik secara horisontal untuk mencari dan menambah sumber-sumber produksi berdasarkan sumber kekayaan alam yang belum dimanfaatkan maupun secara vertikal dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari sumber-sumber produksi yang berasal dari sumber kekayaan yang telah ada – maka kurikulum pendidikan kejuruan terus dikembangkan seiring dengan laju pembangunan.

Dengan mengacu kepada Kurikulum 1976, pada tahun 1978/1979 sekolah-sekolah menengah kejuruan telah meluluskan tamatan pertama dan hampir semuanya telah diserap oleh pasar kerja. Suatu studi tindak lanjut – semacam studi penelusuran lulusan (tracer study) untuk mengetahui pekerjaan para lulusan dilaksanakan melalui kerjasama dengan industri di bawah suatu komite khusus. Langkah ini sangat penting untuk mengetahui efektivitas program yang dilaksanakan dan sekaligus mengukur pengaruhnya terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

2. Penyesuaian Masa Pendidikan

Dalam Kurikulum 1976, lama pendidikan pada SMKTA adalah 3 tahun kecuali STM Pembangunan yang sejak awal pendiriannya diprogramkan 4 tahun. Guna menjembatani tenaga profesional (S1) dan tenaga teknisi sebagaimana tertera pada piramida jenjang ketenagakerjaan pada saat itu, diperlukan tenaga teknisi industri yang berasal dari tamatan program 4 tahun seperti STM Pembangunan.

Melalui serangkaian pembahasan pada tahun 1979, SMTK dan SMIK yang semula lama pendidikannya 3 tahun diubah menjadi 4 tahun berdasarkan Kepmendikbud No. 0250/0/1979 tanggal 3 Nopember 1979. Di lingkungan pendidikan menengah ekonomi, 100 SMEA yang telah atau sedang dikembangkan menjadi SMEA Pembina, lama pendidikannya diubaha dari 3 tahun menjadi 4 tahun.





Dalam perkembangannya, SMEA Pembina program 4 tahun kurang diminati oleh masyarakat. Maka pada bulan Mei 1981 diputuskan bahwa semua SMEA melaksanakan satu jenis kurikulum yaitu program 3 tahun, dan istilah “Pembina” tidak digunakan lagi. Sementara itu, perguruan tinggi mulai mengembangkan jalur profesi melalui Politeknik dengan program D-I, D-II, dan D-III. Keberadaan program 4 tahun pada sekolah menengah kejuruan mulai menjadi bahan pembahasan untuk menilai seberapa jauh berduplikasi dengan program D-I di Politeknik. Dalam perkembangannya, lama pendidikan SMTK dalam Kurikulum SMK Tahun 1984 diubah kembali menjadi program 3 tahun.

3. Pembaruan melalui Kurikulum 1984

Setelah Kurikulum 1976/1977 dilaksanakan selama sekitar 4 tahun, dengan bantuan tenaga ahli yang diperbantukan pada Direktorat Dikmenjur dimulailah pengkajian terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang diprediksikan akan diperlukan selama Pelita IV dan Pelita V. Proses penelaahan kurikulum tersebut dilakukan mulai awal tahun 1981. Kurikulum yang telah dipelajari antara lain kurikulum SMKK/STMK, SMEA, STM dan Pendidikan Kesenian. Salah satu hasilnya adalah terdapat kecenderungan tidak sejalannya pelajaran teori kejuruan dan praktik kejuruan untuk pelajaran yang sama. Berdasarkan temuan tersebut, maka dalam penyusunan kurikulum STM Jurusan Las dan Fabrikasi Logam, pelajaran teori kejuruan dan praktik kejuruan dipadukan.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

Sementara proses penelaahan berlangsung, pada tahun 1982/1983, Pusat Kurikulum dan Sarana Pendidikan (Puskurandik) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Dikbud) melakukan evaluasi kurikulum secara nasional mulai dari kurikulum TK sampai dengan SLTA, termasuk SMK. Hasil evaluasi tersebut melahirkan Keputusan Mendikbud (Kepmen) No. 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kurikulum ini, mulai diimplementasikan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu pada semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.



Sebagai realisasi Kepmen tersebut, kurikulum pada semua jenis dan jenjang pendidikan menengah kejuruan ditata kembali untuk memasukkan mata pelajaran PSPB tanpa mengubah kurikulum secara keseluruhan. Caranya adalah dengan mengurangi alokasi waktu 1,2 atau 3 mata pelajaran. Kurikulum yang berisi PSPB tersebut dikenal sebagai Kurikulum Modifikasi dan dilaksanakan secara serentak di kelas I-IV mulai tahun pelajaran 1984/1985.

Sementara Kurikulum Modifikasi dilaksanakan di lapangan, Direktorat Dikmenjur melanjutkan pengembangan kurikulum yang berorientasi kepada lapangan pekerjaan yang diprediksikan diperlukan pada Pelita IV dan V. Dokumen Klasifikasi Jabatan Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dipelajari dan pertemuan-pertemuan yang melibatkan berbagai pihak industri dan dunia usaha ditingkatkan.



Dari serangkaian kegiatan yang diadakan dengan selalu melibatkan Balitbang Dikbud tersebut, akhirnya dihasilkan Kurikulum SMK tahun 1984. Adapun ciri-ciri kurikulum 1984 adalah sebagai berikut:

- Organisasi kurikulum ke dalam Program Inti dan Program Pilihan. Di SMKTA, Program Inti : Pilihan adalah 60% : 40%; sedangkan di SMKTP, Program Inti : Pilihan sebanyak 70% : 30%.
- Program Inti terdiri atas MPDU (Mata Pelajaran Dasar Umum) dan MPDK (Mata Pelajaran Dasar Kejuruan).
- Pelajaran teori diintegrasikan ke dalam pelajaran praktik untuk mata pelajaran yang sama.
- Tahun pertama merupakan tahun bersama (belum dijuruskan).
- Menerapkan sistem kredit semester.
- Mulai dilaksanakan Bimbingan Karir (BK)
- Sifat SMK tidak terminal; lulusannya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
- Istilah-istilah yang digunakan adalah Kelompok, Rumpun, Program Studi.

4. Fasilitas Pendidikan

Perencanaan dan penyediaan fasilitas pendidikan kejuruan merupakan suatu usaha yang mencerminkan pelaksanaan kurikulum secara lancar, dilihat dari jenis, jumlah maupun spesifikasinya sehingga setiap siswa mendapatkan pengalaman

belajar dan latihan-latihan keterampilan kejuruan yang memadai. Pemenuhan fasilitas pendidikan untuk SMK pada dasarnya dilakukan secara bertahap. Untuk meningkatkan mutu STM dengan jumlah jam praktik yang memadai, didirikan 4 BLPT tambahan di Padang, Palembang, Semarang dan Yogyakarta di samping sejumlah STM lainnya yang dikembangkan dengan bantuan Belanda, Australia dan ADB. SLTA Kejuruan lainnya juga ditingkatkan fasilitas pendidikannya seperti SMEA Pembinan, SMKK, SMTK, SMPS dan sekolah-sekolah kesenian.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

5. Tenaga Kependidikan

Implementasi program pendidikan supaya berhasil tidak hanya tergantung pada mutu kurikulum dan fasilitas pendidikan yang mendukungnya, melainkan juga ditentukan oleh jumlah dan kemampuan tenaga kependidikannya. Dalam hal ini, kompetensi guru kejuruan harus mencakup dua aspek pokok. Pertama, seorang guru kejuruan harus mahir dalam ilmu dan keterampilan kejuruan. Kedua, ia harus pula mahir dalam mengalihkan ilmu dan keterampilan kejuruan yang dimilikinya kepada peserta didik. Dengan kata lain, seorang guru kejuruan dituntut untuk menguasai dua profesi sekaligus, yaitu profesi kejuruan dan profesi keguruan.

Seperti telah dikemukakan terhadulu, dalam rangka pelaksanaan kurikulum yang dibakukan (Kurikulum 1976/1977), Direktorat Dikmenjur melakukan analisis ketenagaan dengan hasil sebagai berikut:

- Jumlah guru yang ada sebanyak 12.746 termasuk kelebihan 3.785 guru yang tidak sesuai dengan keahlian yang diperlukan di SMK yang bersangkutan, sehingga jumlah guru yang efektif hanya 8.961 orang. Bila dibandingkan dengan kebutuhan sebanyak 23.846 orang, maka tenaga yang efektif tersebut hanya sekitar 37% dari keperluan.
- Dari kelebihan 3.746 orang, melalui program penyesuaian (pelatihan kembali), diperkirakan masih dapat dimanfaatkan sekitar 1.998 orang guru. Dengan adanya kurikulum baru, maka sejumlah guru harus ditatar untuk menyesuaikan kemampuannya dengan persyaratan kurikulum yang baru. Sejak Pelita II, baru sekitar 4.000 orang dari 8.961 guru efektif yang mendapatkan penataran.

- Dengan asumsi bahwa sekitar 1.000 guru lainnya memenuhi persyaratan karena usaha sendiri atau cara-cara lain, maka jumlah tersebut menjadi 5.000 atau 20% dari keperluan seluruhnya. Guru yang masih memerlukan penyesuaian adalah 8.961 guru dikurangi 5.000 guru sehingga menjadi 3.961 guru. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekurangan guru yang perlu diangkat adalah 23.846 dikurangi 10.959 menjadi 12.887 guru. Sementara itu, guru yang masih memerlukan penyesuaian mutu melalui pelatihan sebanyak $12.887+3.931 = 18.846$ guru.

Disamping masalah kekurangan guru, masih ada masalah yang lebih mendasar antara lain, pertama, profesi guru kejuruan kurang menarik dengan gaji yang relatif kecil sehingga ada kecenderungan pada sebagian guru untuk pindah ke dunia usaha dan dunia industri. Kedua, program pendidikan guru kejuruan yang ada belum sepenuhnya berorientasi kepada penyediaan tenaga guru kejuruan, kecuali di IKIP Padang dan IKIP Yogyakarta. Ketiga, mekanisme pengangkatan dan pembinaan karier guru kejuruan masih lebih menitikberatkan persyaratan administratif. Akibatnya, banyak guru yang diangkat dan ditempatkan di sekolah-sekolah tidak sesuai dengan keperluan sekolah yang bersangkutan.





Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah menata kembali seluruh spektrum pendidikan menengah kejuruan sebagai langkah lanjut dari usaha pembaruan kurikulum. Disamping itu, dikembangkan pula sistem pengadaan, peningkatan dan pengembangan guru kejuruan pada umumnya secara efektif dan efisien. Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sistem tersebut antara lain:

- Memposisikan guru kejuruan agar memiliki relevansi yang tinggi dengan program-program sekolah menengah kejuruan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam batas waktu yang ditentukan.

- Menempatkan posisi dan status guru kejuruan secara wajar sesuai dengan peranannya yang sangat penting serta beban tugasnya yang berat sehingga profesi guru kejuruan dapat lebih menarik.
- Mewujudkan pengembangan karier guru kejuruan melalui usaha pendidikan yang berkesinambungan.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah:

Pertama, menyusun program yang lebih realistis dalam suatu konsep lintas-pintas (breakthrough concept) untuk program-program sebagai berikut:

- Dalam jangka pendek, pengangkatan guru kejuruan hingga memenuhi kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara minimal dengan mendidik dan memagangkan tamatan SLTA Kejuruan melalui program diploma kependidikan.
- Dalam jangka panjang, mempelajari kemungkinan pengadaan guru kejuruan yang bersumber dari tenaga-tenaga profesi kejuruan yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang tinggi di dunia kerja/industri atau dari perguruan tinggi yang relevan, dilengkapi dengan program pendidikan guru kejuruan.



Kedua, menyusun suatu mekanisme yang jelas dan mampu mencakup seluruh rangkaian kegiatan dalam masalah guru kejuruan, yaitu: (a) perumusan dan penentuan kebutuhan; (b) pengadaan dan pendidikan; (c) pengangkatan dan penempatan; (d) pembinaan karier; dan (e) peningkatan dan pengembangan mutu.

Ketiga, untuk mengatasi masalah kekurangan guru yang sangat mendesak, suatu langkah yang realistis adalah memanfaatkan sumber-sumber yang telah dibangun melalui program-program Pelita yaitu Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Teknologi di Bandung dan PPPG Kejuruan di Ragunan, Jakarta (kini berada di Sawangan, Bogor) merupakan modal dasar yang sangat potensial untuk dikembangkan guna tujuan dimaksud. Untuk itu, suatu usaha lintas-pintas dilakukan melalui kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Konsorsium Ilmu Pendidikan, dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan membuka program D-III Guru Kejuruan yang diselenggarakan di PPPG Kejuruan dan PPPG Teknologi. Program D-III Guru Teknologi yang diadakan di PPPG Teknologi dimulai pada bulan Januari 1981, sedangkan untuk guru kejuruan diselenggarakan di PPPG Kejuruan dimulai sejak tahun 1982.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

Masa pendidikan Program D-III Guru Teknologi/Kejuruan tersebut adalah 6 semester yang ditempuh melalui pendidikan di institusi (PPPG Teknologi atau PPPG Kejuruan) selama 3 semester, dan 3 semester lainnya diselenggarakan secara berlapis di SMK yang ditunjuk. Selama mengikuti pendidikan di SMK, mahasiswa diwajibkan melakukan 40 jam tatap muka per minggu termasuk 12-18 jam pelajaran mengajar di bawah supervisi guru senior di SMK yang bersangkutan. Mulai semester IV, mahasiswa dilatih untuk membangun kerjasama dengan industri setempat guna memperoleh pengalaman industri.



Pendidikan Guru Kejuruan lainnya seperti guru pertanian diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan IKIP Jakarta, sedangkan untuk guru kesenian baru mulai dilaksanakan pada Pelita IV.

6. Manajemen dan Administrasi

Pengembangan fasilitas dan peralatan sekolah kejuruan dilakukan secara simultan dengan perbaikan pada pengelolaan administrasi sekolah, sehingga dicapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Namun sistem pengelolaan dan administrasi sekolah yang ada saat itu tidak mencukupi untuk mengikuti perkembangan peningkatan fasilitas sekolah. Untuk mengelola dan membina kegiatan pendidikan menengah kejuruan menjadi kegiatan-kegiatan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna sehingga secara ekonomis mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perilaku para pengelola pendidikan mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat yang teratas, dituntut untuk memenuhi syarat sebagai manajer, administrator dan organisator yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab dan berwibawa. Untuk itu, diupayakan untuk terciptanya suasana kerja yang selaras, serasi dan menyenangkan sehingga gairah kerja staf meningkat. Di samping itu, prinsip kebersamaan diterapkan guna menimbulkan rasa memiliki di kalangan staf, rasa bangga sebagai anggota kelompok, dan mampu bekerjasama dengan sesama anggota kelompok yang didukung oleh pengelolaan yang terbuka.

7. Kesiswaan

Masalah utama yang berkaitan dengan minat siswa untuk memasuki pendidikan menengah kejuruan adalah pertama, adanya pandangan dan anggapan di kalangan para remaja bahwa pendidikan kejuruan “kurang intelektual”, kurang bergengsi, dan tidak berbobot yang diperkuat oleh fasilitas pendidikan yang belum memadai saat itu, sehingga kurang menarik siswa. Kedua, ada rasa ketidakpastian di kalangan remaja untuk memperoleh pekerjaan setelah mereka menamatkan pendidikannya di SMK. Ketiga, ada pengetahuan di kalangan remaja bahwa prospek pengembangan karier tamatan SMK tidak menggembirakan. Namun terjadi perkembangan yang menggembirakan ketika pada akhir Pelita III jumlah pendaftar ke SMK melebihi jumlah yang diterima dalam seleksi. Pada saat itu, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 34.158 orang, sedangkan yang diterima 26.666 orang (78%). Hal ini membuktikan bahwa dari segi mutu masukan, SMK cukup kompetitif dan para siswanya pun merupakan hasil seleksi.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan



8. Pendirian dan Pengembangan PPPG Teknologi dan Kejuruan

Selain melalui perubahan kurikulum, untuk menjawab tantangan yang dihadapi pada Pelita III, sangat dirasakan perlunya mendirikan pusat pengembangan pendidikan kejuruan yang berfungsi untuk merencanakan dan mengevaluasi kurikulum, melakukan penataran guru, membenahi manajemen dan administrasi sekolah dan juga untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul sesuai dengan tuntutan pertumbuhan industri.

Disadari bahwa permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan selalu timbul dan berkembang. Untuk dapat menjaring permasalahan yang senantiasa berkembang tersebut, kemudian menghimpunnya secara sistematis serta memikirkan dan memecahkannya secara konsisten dan terpadu, diperlukan suatu wahana sebagai kelompok pemikir (think tank) yaitu PPPG lingkup kejuruan. Di samping tugas pokoknya, PPPG tersebut mempunyai tugas dalam hal-hal berikut ini: (a) pengembangan dan evaluasi kurikulum; (b) pengembangan staf, baik guru maupun staf pengelola sekolah; (c) pengembangan fasilitas, baik fisik maupun peralatan yang sesuai dengan permintaan program dalam kurikulum; dan (d) hubungan dengan dunia usaha/industri dan pengembangan sistem maupun program pendidikan kejuruan.

Melalui pendirian PPPG Teknologi di Bandung dan PPPG Kejuruan di Jakarta, kemudian dipindahkan ke Sawangan, Bogor (untuk pertanian waktu itu masih sedang direncanakan dan akan ditempatkan di Cianjur), maka masalah-masalah sistem/program yang tertuang dalam kurikulum, fasilitas dan sistem pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien beserta permasalahan pendidikan/pelatihan guru secara terus menerus akan dapat ditangani dengan baik, termasuk pelatihan bagi para pengelola sekolah.



Foto : Dokumentasi DITPSMK (2015)



9. Efisiensi Biaya Pendidikan

Inovasi dalam mengefisienkan biaya pendidikan yang telah berhasil dirintis pada Pelita III adalah:

- Pemusatan fasilitas praktik bagi sejumlah sekolah sejenis dalam kota yang sama melalui penambahan 4 BLPT masing-masing di Padang, Palembang, Yogyakarta dan Semarang.
- Pendirian kampus pendidikan kejuruan dengan menempatkan dua sekolah menengah kejuruan dalam satu lokasi namun pengelolaannya masih terpisah. Fasilitas umum dipakai bersama; misalnya antara STM dan SMEA Cilacap, Jawa Tengah.
- Berafiliasi dengan industri yang relevan seperti pada STM Penerbangan Bandung dengan PT IPTN (kini, PT Dirgantara Indonesia)

Inovasi lain yang dikembangkan adalah menempatkan beberapa sekolah kejuruan dalam satu lokasi dengan satu administrasi (pengelolaan), sehingga fasilitas dan guru dapat dimanfaatkan lebih efisien. Pada waktu itu, gagasan ini disebut Sekolah Menengah Kejuruan Multi-Disiplin dan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Gagasan ini direalisasikan oleh sekolah kejuruan swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartini Batam dengan membuka program Rekayasa, Bisnis dan Industri Pariwisata dalam satu sekolah. Pada sekolah kejuruan negeri, inovasi ini baru dapat direalisasi sekitar dua dasawarsa kemudian.



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN PADA PELITA IV



Pada pelita IV, pengembangan pendidikan kejuruan lebih diarahkan pada peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Sekolah kejuruan khusus mulai mendapat perhatian disamping pengembangan pendidikan pertanian.

Upaya pengembangan pendidikan kejuruan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan tenaga kejuruan yang akan dipekerjakan dan tenaga kerja mandiri. Upaya penyediaan tenaga kerja untuk dipekerjakan di industry menuntut ditingkatkannya hubungan sekolah dengan dunia industri. Program kurikulum khususnya aspek kejuruan, dikembangkan dengan pendekatan yang pragmatis yang mengacu kepada kebutuhan industri/dunia usaha. Bentuk penyelenggaraan sekolah secara bersama dengan industri sudah mulai dirintis. Upaya pembentukan tenaga kerja mandiri dan peningkatan kemahiran keterampilan siswa dilaksanakan pula melalui kegiatan unit produksi yang sekaligus memberi dukungan kepada kemandirian sekolah, terutama dalam pola pembiayaannya. Program yang dikembangkan pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan regional ataupun nasional, antara lain dibidang pertanian (khususnya perikanan dan bioteknologi), pariwisata dan yang terkait (seperti industri kerajinan), rekayasa (terutama elektronika dan transportasi), dan perbankan.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan



Dalam pengembangannya, secara kualitatif dan kuantitatif, pendidikan menengah kejuruan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perkembangan kualitatif terutama dipengaruhi antara lain oleh perkembangan kurikulum, peningkatan keterampilan dan kemampuan profesional guru melalui berbagai jenis penataran dan pelatihan. Sementara itu, perkembangan kuantitatif terutama dipengaruhi pembangunan gedung baru dan pengangkatan guru baru. Semua perkembangan yang terjadi pada sekolah kejuruan tersebut tidak terlepas dari sejarah perkembangan organisasi pembinaan pendidikan menengah kejuruan itu sendiri.





Pendidikan Kejuruan Pelita IV

Secara umum hasil yang dicapai di bidang pendidikan menengah kejuruan sampai dengan akhir Pelita IV diuraikan berikut ini.

1. Siswa

Peranan siswa sangatlah besar dalam kelanjutan usaha pengembangan sistem pendidikan menengah kejuruan dan teknologi yang mencakup sistem pendidikan, pengembangan jenis, bagian dan jurusan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dengan penekanan pada aspek-aspek yang memberikan kemungkinan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produksi. Selama Pelita III, siswa SLTP kejuruan dan teknologi berjumlah sekitar 80.284, sedangkan jumlah siswa SLTA kejuruan dan teknologi sekitar 538.323. Peningkatan daya tampung siswa ditempuh antara lain melalui penyelenggaraan sekolah Double-shift dan peningkatan jumlah siswa perkelas.

Dibandingkan dengan akhir Pelita IV (1988/1989), perkembangan siswa kejuruan sangatlah pesat. Pada akhir Pelita IV, jumlah siswa SLTP kejuruan dan teknologi 100.128, sedangkan jumlah siswa SMTA kejuruan dan teknologi sekitar 1.178.720. Peningkatan jumlah siswa dalam Pelita IV tersebut ditekankan pada siswa SLTA kejuruan, yaitu ditargetkan bahwa jumlah siswa akan ditingkatkan menjadi lebih dari 1,1 juta siswa atau mencapai kenaikan sebesar 550 ribu siswa. Secara keseluruhan, kenaikan

siswa terjadi pada semua jenis SLTA kejuruan, dengan kenaikan terbesar dicapai oleh SMEA dan STM.

Apabila dilihat dari jumlah siswa yang mendaftar dan yang diterima di SMTP kejuruan dengan membandingkan keadaan akhir Pelita III dengan keadaanakhir Pelita IV, maka jumlah siswa baik yang mendaftar maupun yang diterima pada akhir Pelita IV meningkatkan secara tajam. Pada akhir Pelita III, pendaftara sebanyak 34.158 dan yang diterima sebanyak 26.666 (78%), sedangkan pada akhir Pelita IV pendaftarsebanyak 34.318 dan yang diterima 35.581 (81,3%).

Sementara itu, pada SLTA kejuruan negeri, siswa yang mendaftar pada akhir Pelita III sebanyak 23.349 dan yang diterima 9.709 (41,6%) dan pada akhir Pelita IV siswa yang mendaftar sebanyak 428.896 dan yang diterima sebanyak 160.646 (37,5%). Walaupun persentasenya ternyata menurun dari 41,6% menjadi 37,5%, daya tampung siswa meningkatkan menjadi 16,5%.

Seperti halnya daya tampung, jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan pada akhir Pelita IV mencapai 1.129.316 orang, terdiri atas 519.635 lulusan (46% dari SLTA kejuruan negeri dan 609.681 lulusan (54%) dari SLTA kejuruan swasta. Jumlah keseluruhan lulusan itu dikelompokkan menjadi: Teknologi Kerumahtanggaan dan Pekerjaan Sosial (4,54%), Kesenian (0,78%), Teknologi (49,59%), dan Pertanian (1,76%).



2. Guru

Pengadaan dan peningkatan mutu guru khususnya guru kejuruan, merupakan prioritas utama sebagaimana dikemukakan berikut ini.

a. Guru Pendidikan Teknologi Industri dan Pertanian

Dalam rangka pengadaan guru teknologi, telah dikembangkan kerjasama dengan dua Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), yaitu FPTK IKIP Padang dan IKIP Yogyakarta dengan dukungan dan pinjaman Bank Dunia (Pelita II dan Pelita III). Kedua lembaga ini sejak pertengahan tahun 1983 telah menghasilkan lulusan guru teknologi. Untuk pengadaan guru SMT Pertanian. Pemerintah mengembangkan pula pendidikan guru kejuruan dengan menugasi Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk membuka Pendidikan Guru Kejuruan Pertanian (PGKP) bekerjasama dengan IKIP Jakarta.

Untuk meningkatkan mutu guru dan pengadaan guru melalui program D3 didirikan sejumlah Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), yaitu:

- PPPG Teknologi di Bandung, operasional sejak tahun 1978 (dengan dukungan dana APBN Pelita II, III dan IV, hibah dari Pemerintah Australia dan Pemerintah Jepang serta dana pinjaman ADB).
- PPPG Teknologi di Medan, operasional sejak tahun 1983 (APBN Pelita III dan IV, dan dana pinjaman ADB).
- PPPG Teknologi di Malang, operasional sejak tahun 1985 (APBN Pelita III dan IV, hibah dari Pemerintah Swiss dan dana pinjaman dari ADB).
- PPPG Pertanian di Cianjur, operasional sejak tahun 1989 (APBN Pelita IV, dan dana pinjaman ADB).

b. Pengadaan dan Peningkatan Mutu Guru SMEA

- Program pelatihan prajabatan (pre-service training) dan dalam jabatan (in-service training)service training) bagi calon guru ataupun guru yang ada, dilaksanakan oleh PPPG kejuruan Jakarta bekerjasama dengan IKIP Jakarta (APBN Pelita III dan IV,hibah dari Pemerintah Australia dandana pinjaman ADB).
- Penataran sejumlah guru bidang studi koperasi untuk SMEA yang telah membuka rumpun koperasi (Puslatpenkop), juga penataran guru akuntansi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA).

c. Peningkatan Mutu Guru Bidang Kerumahtangaan dan Kejuruan Kemasyarakatan

Pengadaan dan peningkatan mutu guru untuk bidang ini dilakukan melalui :

- PPPG Kejuruan Jakarta yang bekerjasama dengan IKIP Jakarta (untuk program D-III, rumpun boga kecantikan),
- Kerjasama dengan IPB (khusus untuk program D-III rumpun gizi),
- Kerjasama dengan BPLP Bali dan Bandung, Direktorat Jendral Pariwisata Pos dan Telekomunikasi baik Diploma III Perhotelan maupun in-service program Perhotelan, Boga, dan Patiseri
- Kerjasama dengan Unit Pelayanan Sosial, Rehabilitasi, koreksi dan Medis.

d. Pengadaan Guru Kesenian dan Industri Kerajinan

Pengadaan guru kesenian dan industry kerajinan dilakukan melalui:

- Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi kesenian seperti ASTI, AKSI, AMI dan ISI,
- Rekrutmen seniman alam potensial, terutama untuk bidang studi tradisional,
- Rekrutmen lulusan IKIP dan FKIP yang terbatas, terutama untuk bidang studi MPDU dan MPK yang masih belum memadai, mengingat pendidikan seni di LPTK masih bersifat umum,
- Program D-III, melalui proyek PPPG kesenian di Yogyakarta, bekerjasama dengan IKIP setempat (APBN Pelita III dan IV, dan dana pinjaman ADB). Sementara itu, peningkatan mutu guru yang sudah ada dilakukan melalui PPPG Kesenian (Pelita IV, dan bantuan ADB), kerjasama dengan berbagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kesenian, dan Workshop/studi banding didalam dan keluar negeri



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN PADA PELITA V



Pada tahun 1988, rencana serta program-program telah tampak tersusun rapi dalam konteks upaya menyediakan tenaga terampil pada jenjang menengah. Telah tergambar bagaimana kaitan tingkat kemahiraan yang selayaknya ada berdasarkan piramida ketenagaan yang lazim berlaku dalam dunia kerja. Bahkan secara kuantitatif juga sudah diupayakan target jumlah tenaga yang harus dihasilkan tahun demi tahun dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Pengelompokan ke dalam bidang-bidang garapan juga sudah terbentuk; ada kelompok Teknik, Pertanian, Kerajinan dan Kesenian. Bidang-bidang lainnya yaitu perdagangan,

administrasi perkantoran, boga, busana, pariwisata, dan sebagainya dikelompokkan dalam satu wadah yang menggunakan nama “Kejuruan” – tentu dalam pengertian yang lebih sempit dari istilah “kejuruan” yang mencakup semuanya.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan



Program-Program Yang Telah Dicanangkan Pada Pelita V

1. Program Pengembangan Pada Faktor Lembaga, Siswa, Dan Ketenagaan

Dalam kurun waktu 1988-1992, telah terjadi penambahan lembaga sekolah menengah kejuruan, peresmian 4 PPPG, penambahan jumlah siswa pada SMK dan tenaga pengelolaan pendidikan.

a. Kelembagaan

Pada awal tahun 1988, jumlah SMKTP tercatat sebanyak 260 buah, terdiri dari 72 SKKP dan 188 ST. Konsekuensi dari disahkannya UU No. 2/1989, PP. No. 28/1990 dan PP. No. 29/1990 adalah bahwa mulai tahun 1991/1992 telah dilakukan perubahan bentuk bagi 81 SMKTP (yaitu 60 ST dan 21 SKKP) menjadi SMP, dilanjutkan pada tahun 1992/1993 dengan perubahan bentuk bagi 106 SMKTP lainnya. Dengan demikian masih ada 73 SMKTP yang perlu dipelajari eksistensinya (apakah akan dialihfungsikan menjadi SMP atau SLTA Kejuruan).

Tercatat penambahan jumlah SMKTA Kejuruan dalam kurun waktu empat tahun tersebut adalah sebanyak 47 sekolah, terdiri dari: 5 STM, 1 SMT, 1 SMT Grafika, 2 SMT Kimia, 3 SMT Pertanian, 28 SMEA, 2 SMKK, 3 SMPS, 1 SMIK, dan 1 SMSR. Ke 47 sekolah tersebut, sebanyak 20 sekolah merupakan pendirian UPT baru dengan fasilitas melalui bantuan ADB Loan 675-INO untuk sekolah pertanian, Loan 715-INO untuk sekolah teknologi, dan Loan 574-INO untuk sekolah non-teknologi. Selebihnya, 5 sekolah merupakan hasil penergian dan 22 sekolah hasil alih fungsi SPG/SGO.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

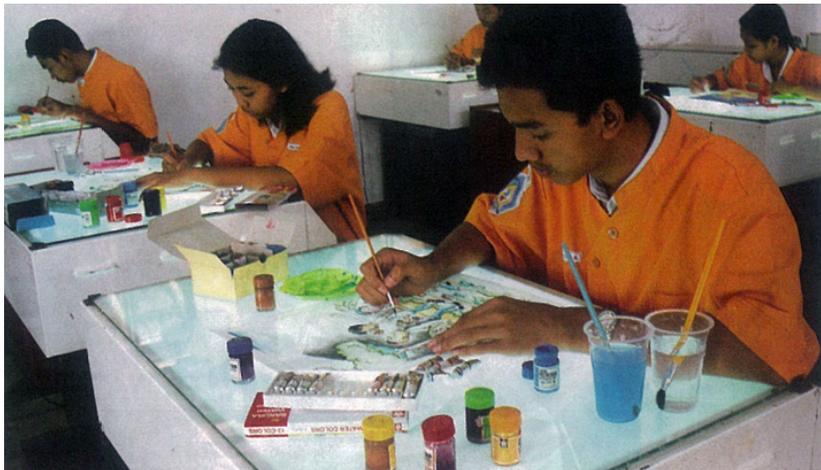
b. Siswa

Perkembangan jumlah siswa pada sekolah-sekolah kejuruan negeri selama kurun waktu 1988-1992 tidak menunjukkan penambahan yang cukup berarti. Untuk sekolah kejuruan tingkat pertama, penyebabnya adalah karena sebagian sekolah sudah tidak menerima siswa baru. Di pihak lain, untuk sekolah kejuruan tingkat atas penambahan siswa yang relative kecil disebabkan adanya pengurangan siswa per kelas guna memenuhi kondisi ideal pelaksanaan kegiatan proses belajar-mengajar. Apabila dibandingkan dengan perkiraan pada Pelita V, maka sasaran jumlah siswa tampaknya akan tercapai melalui sekolah-sekolah menengah kejuruan swasta. Tercatat jumlah siswa sekolah kejuruan negeri dan swasta secara keseluruhan saat itu sebanyak 1.331.196 orang, terdiri dari 458.440 (34,4%) siswa sekolah negeri dan 882.756 (65,6%) siswa sekolah swasta.



c. Ketenagaan

Saat itu jumlah guru pada SMKTP tercatat sebanyak 9.902 orang (tahun 1988 sebanyak 10.230 orang). Dari jumlah tersebut dalam kurun waktu empat tahun (1988-1992), sebanyak 1.336 guru telah mendapatkan peningkatan kemampuan (penataran) yang materinya ditekankan pada mata pelajaran umum. Pada SMKTA, saat itu tercatat sebanyak 45.556 orang tenaga kependidikan (tahun 1988 tercatat 40.377 orang). Dari jumlah tersebut dalam waktu empat tahun (kondisi akhir bulan September 1992), tercatat 30.811 orang telah mengikuti kegiatan penataran.



2. Program Ikatan Kerjasama Dengan Luar Negeri

Upaya peningkatan pembinaan terhadap pendidikan menengah kejuruan juga melibatkan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain. Bentuk kerjasama yang telah dijalin di antaranya dengan TAFE Australia Selatan, Northern Territory Australia dan Pemerintah Kanada.

3. Program Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Industri Dalam Negeri

Beberapa contoh bentuk kerjasama yang telah terwujud antara pendidikan menengah kejuruan dengan pihak dunia usaha/industri dalam negeri dapat dilaporkan sebagai berikut:

- PT IPTN dengan ruang lingkup kerjasama pemanfaatan fasilitas pra PT IPTN untuk praktik kerja lapangan dan pelatihan guru.
- PT PAL Surabaya dengan ruang lingkup kerjasama dalam kegiatan proses belajar-mengajar, pemanfaatan fasilitas PT PAL untuk kegiatan praktik, bantuan biaya operasional praktik, dan sumbangan SPP.
- PT Pupuk Kaltim di Bontang dengan ruang lingkup kerjasama dalam kegiatan proses belajar-mengajar, bantuan pembangunan gedung dan peralatan.

- PT Telkom dengan ruang lingkup kerjasama pemanfaatan fasilitas PT Telkom untuk praktik kerja lapangan siswa dan pelatihan bagi guru.
- PT Toyota Astra dengan ruang lingkup kerjasama kegiatan bantuan peralatan praktik kerja lapangan siswa dan pelatihan guru.
- PT Federal Motor, dengan ruang lingkup kegiatan bantuan peralatan praktik kerja dan bahan ajaran program studi mekanik automotif.
- PT Hotel Indonesia dengan ruang lingkup kegiatan peningkatan mutu keterampilan akomodasi perhotelan dan jasa boga pada SMTK.



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN PELITA VI

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah amanat penting GBIIN 1993, bahkan menjadi titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) yang mengiringi pembangunan ekonomi.

Pendidikan PJP mencakup rentang waktu 25 tahun atau lima Repelita. PJP I berlangsung mulai Pelita I (1969/1970-1973/1974) sampai dengan Pelita V (1988/1989-1993/1994). PJP II dimulai sejak Pelita VI (1993/1994-1997/1998) yang saat itu direncanakan untuk sampai Repelita X (2017/2018). Akan tetapi pada tahun 1998 terjadi gerakan reformasi yang menyebabkan pendekatan pembangunan berdasarkan babak-babak lima tahunan terhenti, sehingga pada sekitar tahun 1990-an dikenal dengan istilah “pembangunan nasional tanpa Repelita”.



PJP sendiri merupakan istilah yang dipopulerkan sejak Indonesia memasuki tahap Pelita VI untuk memberikan label pada masa 25 tahun pertama pembangunan nasional yang telah lewat, dan 25 tahun berikut yang mulai berjalan ketika itu. PJP II dinyatakan secara nasional sebagai tahap tinggal landas atau lepas landas (take-off) -- meminjam istilah yang dipakai oleh Rostow, seorang ekonom terkenal -- menuju negara industri, setelah segala prasyarat yang diperlukan telah disiapkan selama PJP I. melihat berbagai kondisi riil dalam masyarakat yang dinilai belum siap, saat itu 'pelesetan' bahwa yang akan terjadi bukannya "tinggal landas" melainkan "tinggal dilandaskan". Bagaimanapun, idiom-idiom yang berkenaan dengan PJP II, lepas landas, industrialisasi, dan sejenisnya saat itu digunakan dengan semangat yang menggebu-gebu diberbagai forum dan hampir oleh setiap orang, sehingga terasa menjadi sesuatu yang klise. Saat itu, semua orang ingin menggunakan idiom-idiom tersebut.



Foto :
Djojonegoro, Wardiman.
(1998). Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Melalui Sekolah
Menengah Kejuruan



Kini orang-orang enggan dan merasa tak nyaman hati menggunakannya karena terasa sebagai sesuatu yang asing, seakan-akan menjadi bagian dari masa lalu. Beberapa bagian tulisan dalam buku ini termasuk bab ini -- baik dalam idiom-idiom, semangat maupun isinya -- perlu dipahami dalam konteks semangat zamannya, *Zeitgeist*-nya, yang tidak selalu senafas dengan zaman-zaman berikutnya. Itulah sejarah! (Editor).

Sekolah Menengah Kejuruan -- yang merupakan salah satu sub-sistem dari sistem pendidikan nasional, sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mempunyai tujuan utama untuk menyiapkan peserta didik terutama untuk dapat bekerja pada bidang tertentu -- adalah salah satu jenis dan jenjang pendidikan yang mendapatkan perhatian utama sesuai dengan amanat GBHN 1993 dimaksud. Berbagai kajian dilakukan pada tahun terakhir Pelita V sebagai bahan dasar untuk memasuki Pelita VI.



Dan hasil kajian tersebut, ditemukan beberapa hal yang dinilai kurang sejalan dengan wawasan pembangunan sumber daya manusia, antara sebagai berikut:

- Dunia usaha dan industry lebih cenderung memperkerjakan tamatan Sekolah Menengah Atas/Umum (SM/SMU) daripada tamatan STM, SMEA, SMKK, atau tamatan SMK lainnya, dan gaji tamatan STM/SMEA/SMKK tidak berbeda dengan gaji tamatan SMU.
- Program pendidikan menengah kejuruan yang disusun pada Kurikulum 1994 lebih berorientasi pada mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, dan tidak secara jelas terfokus pada penguasaan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja.
- Program pendidikan (kurikulum) disusun oleh guru dan para pakar pendidikan yang tidak mempunyai wawasan lapangan kerja, dan diajarkan oleh guru yang tidak mempunyai pengalaman kerja di dunia kerja, dan hasil pendidikannya pun dievaluasi oleh guru dengan ukuran-ukuran dunia pendidikan, bukan dengan ukuran yang berlaku didunia kerja.
- Perilaku kebiasaan belajar-mengajar disekolah dikonsepsikan sebagai “dunia sekolah” berbeda jauh dengan perilaku, cara kerja, dan kebiasaan yang ada di dunia industry.
- Perilaku sekolah cenderung melaksanakan program “pendidikan demi pendidikan”, dan kurang memahami pasar, wawasan mutu, dan wawasan keunggulan untuk menghadapi persaingan.



Permasalahan Pendidikan Kejuruan pada Pelita VI

Sekalipun telah banyak hal-hal positif yang telah dicapai oleh pembangunan pendidikan kejuruan selama selama PJP I, pencapaian tersebut ternyata belum mampu menjadi landasan yang kuat menghadapi tantangan yang ada, dan yang (akan) timbul pada era globalisasi, era perdagangan bebas, dan era teknologi informasi. Menghadapi tantang yang bisa dianalisis dan diperhitungkan, serta kemungkinan tantangan baru yang belum bisa diperhitungkan akibat perkembangan Iptek yang berkembang secara cepat, Indonesia harus melakukan pengkajian ulang terhadap sistem pendidikan kejuarannya. Sistem pendidikan kejuaruan masa depan haruslah handal/tangguh (reliable), luwes (flexible), adaptif dan antisipatif. Untuk menuju kearah itu, pendidikan menengah kejuruan menghadapi berbagai permasalahan fundamental dan operasional.

Program pendidikan kejuruan yang dirumuskan dalam Kurikulum 1994 (yang disiapkan pada Pelita V) masih merupakan produk dari konsep seperti tersebut di atas, yaitu cenderung bersifat “supply-driven” dan “school-based program”. Sekalipun penyusunan Kurikulum 1994 telah melalui proses validasi sebagai implementasi prinsip relevansi, pihak yang menyusun kurikulum tersebut adalah para pakar pendidikan yang masih berasal dari lingkungan Depdikbud sendiri, termasuk di dalamnya dari kalangan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Pada tingkatan implementasi kurikulum di sekolah, sekalipun telah dialokasikan satu catur wulan (cawu) untuk kegiatan praktik kerja lapangan, program praktik tersebut disusun oleh sekolah dan pelaksanaannya dititipkan tanpa pengawasan ke lapangan kerja. Akibatnya, selain program praktik itu sendiri tidak cukup terkait dengan lapangan, juga para siswa tidak cukup mendapatkan manfaat dari praktik lapangan yang dijalaninya.



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan



Foto : Djojonegoro, Wardiman. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan

Beberapa permasalahan yang dapat diangkat dari Kurikulum 1994 untuk SMK adalah:

- Program pendidikan cenderung berorientasi pada pengajaran mata-mata pelajaran, dan tidak terfokus pada pencapaian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- Penjurusan yang dimulai dari awal (tahun pertama) kurang memberikan dasar yang kuat dan bekal dasar yang memadai kepada para siswa untuk secara luwes (fleksibel) menghadapi perkembangan di masa mendatang.



- Muatan program yang merupakan kompetensi-kompetensi kunci (key competences) menghadapi perkembangan di masa mendatang belum memadai. Misalnya jam pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam masih sedikit (bahkan ada yang berakhir di kelas II). Muatan untuk kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan menggunakan informasi juga masih belum terprogram dengan jelas.
- Jumlah jam pelajaran per minggu (yakni 42 jam pelajaran = 31,5 jam @ 60 menit) belum merupakan jam yang membiasakan siswa memasuki jam kerja dunia industri.



■ BAB 2

PROFIL

PEMBANGUNAN SMK

KEBIJAKAN DAN PROGRAM UTAMA PADA MASANYA



a. Drs. Soenaryo, M.Sc. (1970-1978)



Direktur Pembinaan SMK ke-1

Membangun dan memperluas pendidikan teknik dan kejuruan dengan dukungan dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin besar. Misalnya, pada akhir Pelita II setiap tahun diproyeksikan untuk dihasilkan 22.500 juru teknik (tradesmen). Menjabarkan piramida tenaga kerja untuk sektor industri, bisnis, dan jasa ke dalam program-program pendidikan teknik dan kejuruan. Mengembangkan Kurikulum SMK 1976 yang merupakan kurikulum pertama yang dibakukan untuk menggantikan Kurikulum sementara tahun 1974. Membangun 2 Instalasi Pendidikan Teknik (IPT), 6 Proyek Perintis STM Pembangunan 4 tahun dengan jurusan BELMO, dan 9 Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) yang menjadi tempat praktik sejumlah STM di sekitarnya, dan 2 Fakultas Kejuruan Teknik (FKT) di IKIP Padang dan Yogyakarta. Membangun PPPG Teknologi (TTUC) Bandung dan PPPG Kejuruan (VTUC) Jakarta. Meningkatkan mutu 80 STM, 100 SMEA Pembina, dan 45 SKKA; membangun 4 SMT Pertanian, 6 SMTK, 4 SMIK, 8 SMPS, 8 SMKI. Mengubah

nomenklatur sekolah menengah kejuruan dengan mengikuti hukum "DM", misalnya SKKA menjadi SMKK, STM menjadi SMT, Kokar menjadi SMKI, SPIK menjadi SMIK, SMIInd menjadi SMM, SPSA menjadi menjadi SMPS, SFMA menjadi SMF.



PPPPTK Teknologi Bandung, sekarang P4TK Bandung
Foto : <http://smkprimaunggul.sch.id>, 2016

Curriculum Vitae

Nama : Soenaryo
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 5 Februari 1931
Pendidikan Terakhir :

- M.Sc. dalam bidang Meteorologi Oseanografi - New York University (1965)
- Bachelor (S1) Fisika - Institut Teknologi Bandung (1960)
- Sarjana Muda Meteorologi dari Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam - Universitas Indonesia (1956)

b. **Ir. Hadiwaratama, M.Sc.E.E. (1978-1984)**



Direktur Pembinaan SMK ke-2

Menangani tenaga kependidikan kejuruan sebagai unsur pokok pendidikan melalui inventarisasi dan analisis jumlah dan mutu/kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Langkah ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Inventarisasi kemampuan LPTK dalam memasok guru kejuruan dibandingkan dengan kebutuhan. Menurunkan konsep terobosan supaya program-program SMK berjalan, sambil meningkatkan mutu guru yang ada (in-service training) maupun mendidik guru baru (pre-service training) melalui program D-III Guru Kejuruan dengan sistem lapis untuk memenuhi kebutuhan akan guru sebanyak 3.500 orang saat itu. Program ini dilakukan melalui Ikatan Dinas. Mendirikan sejumlah PPPG lingkup kejuruan yang baru serta meningkatkan fungsi dan peranan PPPG yang telah ada untuk menjadi kelompok pemikir (think tank) dalam pengembangan, perencanaan, dan operasionalisasi seluruh aspek pendidikan kejuruan di Indonesia. Tugas mendesak saat itu adalah menangani langsung pendidikan dan pelatihan guru yang ada dan calon-calon guru, melaksanakan program D-III GK bekerjasama dengan LPTK terdekat dan Politeknik Mekanik Swiss-ITB/POLMAN-Bandung. Melanjutkan program-program

pebangunan sekolah-sekolah kejuruan sesuai dengan sasaran-sasaran Pelita bekerjasama dengan ADB, Pemerintah Swiss, Australia, Belanda, Perancis, dan lain-lain.



Pendidikan D3KT (Diploma 3 Kejuruan Teknik).
kerjasama dengan Pemerintah Konfederasi Swiss
untuk mendidik dan meningkatkan guru-guru SMK
foto: polman.bandung.ac.id

Curriculum Vitae

Nama : Hadiwaratama

Tempat Tanggal Lahir : 26 Oktober 1937

Pendidikan Terakhir :

- Ir. dari Institut Teknologi Bandung (1963)
- Master of Science in Engineering (M.Sc.Eng.) - Purdue University (1966) Amerika Serikat

c. Prof. Dr. A.O.B. Situmorang (1984-1987)



Direktur Pembinaan SMK ke-3

Pada akhir Pelita III terdapat 274 SLTP Kejuruan yang terdiri atas 194 ST dan 80 SKKP, serta 559 SLTA Kejuruan). Merehabilitasi 64 SLTP Kejuruan Negeri dan mengkonsolidasikan 210 sekolah jenis lainnya. Mengembangkan SKK (Sekolah Keterampilan Kejuruan) 4 tahun di 10 lokasi. Melakukan penyesuaian 11 jurusan di SLTP Kejuruan dan 61 jurusan di SLTA Kejuruan. Mengembangkan SMK yang membuka program kejuruan teknik dan non-teknik dibawah satu atap, yaitu SMK Kartini Batam, disusul dengan STM Manna di Bengkulu dan STM Dumai. Mengembangkan “pola asuh” dalam pendirian sekolah kejuruan yang melibatkan industri dan pemerintah daerah. Menjabarkan dan melaksanakan Kurikulum 1984 SMK yang menghasilkan 97 program studi. Meningkatkan daya tampung 145 STM Negeri, 277 SMEAN, 97 SMKK/SMTK, dan menambah fasilitas 23

SMT Pertanian. Menyelesaikan pembangunan PPPG Teknologi Medan dan Malang, PPPG Kejuruan di Jakarta, PPPG Kesenian di Yogyakarta, dan PPPG Pertanian di Cianjur. Mengangkat 10.000 guru baru untuk sekolah kejuruan, dan mengembangkan “Pola Mentawai” dalam rekrutmen calon guru dan penempatannya.

Prof. Dr. A.O.B. Situmorang pernah menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana IKIP Jakarta.



Sekolah Keterampilan Kejuruan
(sekarang SMKN 1 Koto Baru, Sumbar)
foto : sekolah.data.kemdikbud.go.id

d. **Drs. Suradjiman (1987-1988)**



Direktur Pembinaan SMK ke-4

Melakukan alih fungsi SLTP Kejuruan (ST, SKKP) menjadi SMP/SLTP Umum. Meskipun saat UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum disahkan (dalam tahap pembahasan di DPR-RI),



SLTP Kejuruan berubah menjadi SMP/SLTP umum dengan nama SMP N 274 Jakarta

foto : tribatanews.com

Hasil-hasil kajian merekomendasikan bahwa SLTP Kejuruan perlu diubah menjadi SLTP Umum. Alasannya antara lain adalah kenyataannya sebagian besar ST dan SKKP tetap melanjutkan ke SLTA (khususnya SLTA Kejuruan) dan mereka belum cukup umur untuk bekerja.

e. Prof. Dr. Benny Suprpto Brotosiswoyo (1988-1992)



Direktur Pembinaan SMK ke-5

Mengembangkan Institusi Pasangan (industri dan perusahaan) untuk menjamin sustainabilitas financial (financial sustainability) dan relevansi serta ukuran keberhasilan sekolah menengah kejuruan.

Pengembangan Sekolah Seutuhnya (PSS) atau Integrated School Development (ISD). Melalui program ini, program SMK disesuaikan dengan konteks lingkungan



SMK N 5 Banjarmasin merupakan salah satu sekolah yang pernah menyelenggarakan program Pengembangan Sekolah Seutuhnya
foto : smkn5bjm.sch.id

Kemahiran tenaga dikembangkan dengan bantuan tenaga dari PPPG lingkup kejuruan yang diterjunkan ke lokasi sekolah. Menindaklanjuti implikasi dari disahkannya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain dengan mengalihfungsikan 187 SLTP Kejuruan (ST dan SKKP) dari 274 SLTPK yang ada saat itu. Menambah dan mengembangkan 47 SMKTA yang meliputi pendirian 20 SMKTA baru, peneraian 5 SMKTA Swasta, dan alih fungsi 22 SPG/SGO menjadi SMKTA. Meningkatkan mutu 30.811 guru sekolah kejuruan melalui berbagai penataran. Melanjutkan pembangunan PPPG Teknologi Malang dan meningkatkan peran dan fungsi PPPG yang telah ada, serta melengkapi sarana BLPT.

Benny Suprpto Brotosiswojo merupakan salah satu Guru Besar ITB (1981-sekarang), pernah menjabat sebagai Direktur Dikmenum (1976-1988), Direktur Dikmenjur (1988-1992), Rektor Universitas Terbuka (1992-1996), dan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Curriculum Vitae

- Nama : Benny Suprpto
- Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Mei 1934
- Pendidikan Terakhir :
- Ph.D - Purdue University, Amerika Serikat (1964)
 - Bachelor (S1) - Institut Teknologi Bandung (1960)

f. **Drs. Jorlin Pakpahan (1992-1998)**



Direktur Pembinaan SMK ke-6

Mengimplementasikan Kurikulum SMK tahun 1984 dan merevisinya menjadi Kurikulum SMK 1996-1998. Menjabarkan kebijakan “Link & Match” ke dalam program-program pendidikan kejuruan dengan tujuan agar proses, program, dan hasil pendidikan SMK lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Mendifusikan perubahan orientasi dalam pengelolaan pendidikan kejuruan yang meliputi 10 butir, antara lain perubahan dari supply-driven ke demand-driven, pengembangan program berbasis kompetensi, menghilangkan sekat yang memisahkan sekolah dan dunia usaha/ industri, menggagas sistem multi-entry-exit dan sertifikasi kompetensi, serta menggalakan Unit Produksi. Mengembangkan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK dengan melibatkan belasan ribu industri/perusahaan sebagai institusi pasangan yang mewadahi 409.734 siswa. Merestrukturisasi organisasi Direktorat Dikmenjur dengan diadakannya Subdit Pembinaan PSG. Memulai pelaksanaan Lomba Keterampilan/Kompetensi Siswa (LKS) SMK, melakukan acara “Gebyar SMK”, memfasilitasi

Pokja Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia yang menghasilkan laporan “Keterampilan Menjelang 2020” (1997). Dalam kurun waktu 1994-1998, siswa SMK naik dari 1,47 juta menjadi 2,0 juta. Mengembangkan dan mengimplementasikan program keterampilan pada ratusan SLTP yang meliputi 8 bidang keterampilan

Drs. Jorlin Pakpahan pernah menjabat sebagai staf Pembantu Pimpinan pada Direktorat Pendidikan Teknologi Depdikbud (1969-1973), Kasi Sarana dan Prasarana Direktorat Dikmenjur (1973-1975), Kasubdit PTP (1976-1983), Kepala PPPG Teknologi Bandung (1980-1992), Direktur Dikmenjur (1992-1998), Sekjen ATEA (ASEAN Technician Education Association) (1982), Sekjen Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (1994-1998), Governing Board Member SEAMEO VOCTECH, Brunei Darrussalam (1996-1998), Resource Member, Colombo Plan Staff Collage for Technician Education, Manila (1994-1999). Mengikuti berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri (1976-1995), serta menjabat Ketua Yayasan EL-EM di Jakarta.

Curriculum Vitae

- Nama : Jorlin Pakpahan
- Tempat Tanggal Lahir : Pulau Samosir, 12 Juni 1943
- Pendidikan Terakhir :
- Master (S2) Program Pascasarjana - IKIP Bandung/UPI
 - Sarjana muda (1965) dan Sarjana (1968) - Fakultas Keguruan Teknik IKIP Yogyakarta

g. **Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto (1998-2005)**



Direktur Pembinaan SMK ke-7

Merevisi dokumen “Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020” untuk memungkinkan SMK lebih fleksibel dan permeabel selaras dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Menegaskan SMK bukan lagi hanya sebagai “pendidikan kejuruan” melainkan lembaga “Diklat Kejuruan” atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT). Mengubah pengelolaan Diklat kejuruan dan terpusat menjadi lebih terdesentralisasi. Memprakarsai perubahan dari pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (*competence-based learning/curriculum*). Menata ulang bidang/program keahlian di SMK sebagai PPKT. Skenario makro tersebut dituangkan dalam dokumen “Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020”. Menggagas berdirinya Badan Nasional Standarisasi/Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dilengkapi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Mengembangkan kurikulum kecakapan hidup (*life skills*). Memprakarsai pembaruan Kurikulum SMK tahun 1999 dan melakukan kajian-kajian bagi pembaruan kurikulum berikutnya.



Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto mengajar sebagai Dosen ITB (1977-sekarang) untuk matakuliah Bahan Galian Industri dan Kristal Optik (1978-1980), Geoteknik (1986-1990), Hidrogeologi, Simulasi Data, Pemetaan Air Tanah, Teknik Pemboran, Hidrogeologi Lanjut, dan Manajemen Air Tanah (1986-1996). Asisten Umum Lembaga Penelitian ITB (1989-1995), Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Program Pascasarjana ITB (1990-1996) Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Bonn, Jerman (1996-1998), Direktur SEAMEO SEAMOLEC, Jakarta - Indonesia (2007-2015), kini menjabat sebagai Direktur SEAMEO Secretariat, Bangkok - Thailand (2015-2019)

Curriculum Vitae

Nama : Gatot Hari Priowirjanto
 Tempat Tanggal Lahir : Kertosono, 30 Mei 1951
 Pendidikan Terakhir :

- S2 dan S3 Bidang Hidrogeologi - TH Aachen, Jerman (1985)
- Bachelor (S1) Tambang Eksplorasi - Institut Teknologi Bandung (1976)

h. Dr. Joko Sutrisno (2005-2012)



Direktur Pembinaan SMK ke-8

Program utamanya adalah meningkatkan keterampilan siswa SMK melalui pembuatan dan perakitan peralatan praktek sendiri sesuai dengan kompetensi keahlian siswa yang relevan, antara lain pada bidang teknologi, pertanian dan manufaktur. Membuka unit-unit produksi yang berlokasi di sekolah sebagai inkubator bisnis untuk menumbuhkan jiwa wirausaha warga sekolah. Memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008. Melaksanakan program rintisan “Wajib Belajar” 12 tahun dengan langkah awal mengubah Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) menjadi Rintisan Biaya Operasional Sekolah (BOS);



Ikon Kampanye “SMK Bisa”

Serta menciptakan citra baik SMK yang disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia melalui berbagai media komunikasi dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan tingkat kinerja yang dicapai SMK.

Curriculum Vitae

Nama : Joko Sutrisno
 Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 8 Juni 1959
 Pendidikan Terakhir :

- Doctor in Industrial Economics - Universitas Airlangga Surabaya (2000 - 2004)
- Master (S2) Corporate Management - Universitas Gadjahmada (1991 – 1993)



Perakitan Mesin CNC dan Rangka Mobil Oleh Siswa SMK

i. Ir. Anang Tjahjono M.T. (Tahun 2012-2013)



Direktur Pembinaan SMK ke-9

Kebijakan yang dilakukan adalah meletakkan dasar sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi pengelolaan SMK. Mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya pembelajaran klasikal tetapi juga memanfaatkan teknologi yang terkini yaitu menggunakan e-learning.





■ Perakitan dan Pemasaran Laptop Oleh Siswa SMK

Curriculum Vitae

Nama : Anang Tjahjono
 Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 19 November 1964
 Pendidikan Terakhir :

- Master (S2) Electrical Engineering - Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1999)
- Bachelor (S1) Electrical Engineering - Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1990)
- Diploma III - Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1986)

j. **Drs. M. Mustaghfirin Amin, M.B.A (2013-Sekarang)**



Direktur Pembinaan SMK ke-10

Kebijakan yang dilakukan adalah berpijak pada gagasan nawacita Presiden Jokowi pada poin ke lima yaitu; “meningkatkan kualitas hidup manusia” dan poin ke enam yaitu; “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”.

Strategi yang dilakukan adalah dengan membuat pemetaan SMK se-Indonesia dalam program Verifikasi Wilayah (Verwil). Data yang muncul pada Verwil ini kemudian dianalisa menjadi informasi dasar untuk pengambilan intervensi kebijakan. Sehingga program-program utama yang diterapkan adalah sebagai berikut;

1. Menyukseskan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. Tujuan yang akan dicapai melalui strategi ini adalah meningkatkan jumlah dan kualitas peserta didik SMK

2. Afirmasi khusus pada daerah 3T. Program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SMK yang berada di berada di Provinsi Papua dan Papua Barat, berada di Daerah Khusus, dan berada di Daerah yang tergolong Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T).
3. Memfokuskan pengembangan SMK Bidang Keahlian Perikanan dan Kelautan, Pertanian, dan Pariwisata
4. Pemenuhan Guru Produktif melalui: a) kolaborasi dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; b) Pengadaan Guru Produktif oleh Pemerintah (Pusat+Daerah); dan c) Recognition Prior Learning (RPL)
5. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik. Arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan tujuan strategis ini melalui:
 - a. Pengelolaan data pokok pendidikan menengah kejuruan
 - b. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja lembaga
 - c. Penyediaan layanan informasi kebijakan
 - d. Pengembangan e-Bantuan. Implementasi e-bantuan SMK untuk proses penyaluran bantuan dan pelaporannya dengan melibatkan ekosistem sekolah, disdik prov/kab/kota dan masyarakat
6. Penyesuaian bidang keahlian/program studi keahlian dengan kebutuhan global dengan memperhatikan keseimbangan hard dan soft skill
7. Program SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah berfungsi sebagai pusat pengembangan unit Teaching Factory, SMK Rujukan, MKPI



SMK Bidang Keahlian Perikanan dan Kelautan
Foto : Dokumentasi Dit. PSMK

Curriculum Vitae

Nama : M. Mustaghfirin Amin

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 25 Juni 1958

Pendidikan Terakhir :

- Master (S2) Ekonomi dan Bisnis - Universitas GadjahMada (2010)
- Bachelor (S1) Pendidikan Teknologi Elektro - IKIP Negeri Yogyakarta (1984)

BAB 3

PERSIAPAN SMK MENUJU 2020

Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan
Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020



Kunjungan Kerja Mendikbud ke SMK Leonardo Klaten
Foto : Dokumentasi BKLM Kemdikbud

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai pada akhir tahun 2015 dan menghadapi perdagangan bebas untuk kawasan Asia Pasifik (APEC) diperlukan usaha peningkatan kompetensi tenaga kerja agar dapat meninggikan mutu dan ragam produk yang dapat bersaing di pasar bebas. Dalam kaitan tersebut, diperlukan Sekolah Menengah Kejuruan yang handal dan mampu menerapkan prinsip Total Quality Management (TQM) agar dapat menjawab tantangan permasalahan ketenagakerjaan. Hal ini penting karena tujuan utama sistem pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sehingga diharapkan tamatannya menjadi tenaga kerja produktif, mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta dapat mengembangkan dirinya dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat.



Foto : Dokumentasi GIZ - Dit. PSMK

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang sejahtera. Di samping sumber daya alamnya yang kaya, Indonesia memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang berlimpah. Agar potensi tersebut dapat menjadi sumber daya pembangunan, diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan.



SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa
Foto : Dokumentasi Dit. PSMK

Sejalan dengan itu, keterlibatan dunia kerja, khususnya dunia usaha/industri, harus terus dikembangkan dalam penerapan kebijakan pengelolaan sistem pendidikan kejuruan. Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagai implementasi dari kebijakan Link & Match merupakan bukti adanya keterlibatan aktif pihak dunia usaha/industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan



Paradigma program pendidikan kejuruan menjelang tahun 2020 menekankan pada perubahan-perubahan mendasar, antara lain sebagai berikut:

- orientasi pendidikan kejuruan dikembangkan dari supply-driven ke demand-driven
- sistem pengelolaan pendidikan kejuruan berubah dari terpusat menjadi terdesentralisasi
- pendekatan pembelajaran Pendidikan kejuruan bergeser dari pendekatan mata pelajaran menjadi pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (CBT)
- pola penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang sangat terstruktur menjadi lebih fleksibel dan permeable

Rencana Strategis SMK Menuju 2020

1. Paradigma Pembangunan Pendidikan

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2015-2019 disusun berdasar beberapa paradigma sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Rincian paradigma itu adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan untuk semua “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” adalah amanat konstitusi.
2. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis.



3. Pendidikan sepanjang hayat Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.
4. Pendidikan sebagai suatu gerakan Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya menjadi optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

5. Pendidikan menghasilkan pembelajar Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar akan mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik.
6. Pendidikan membentuk karakter Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul yang antara lain bercirikan kejujuran, akhlak mulia, kemandirian, serta kecakapan hidup.
7. Sekolah yang menyenangkan Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya.
8. Pendidikan membangun Kebudayaan Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan juga pada dasarnya adalah proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

2. Kondisi Umum

Rencana Strategis Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2015-2019 merupakan suatu kesinambungan dari pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang 2005-2024 (lihat Gambar dibawah), pembangunan SMK diarahkan pada peningkatan daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global ke depan.

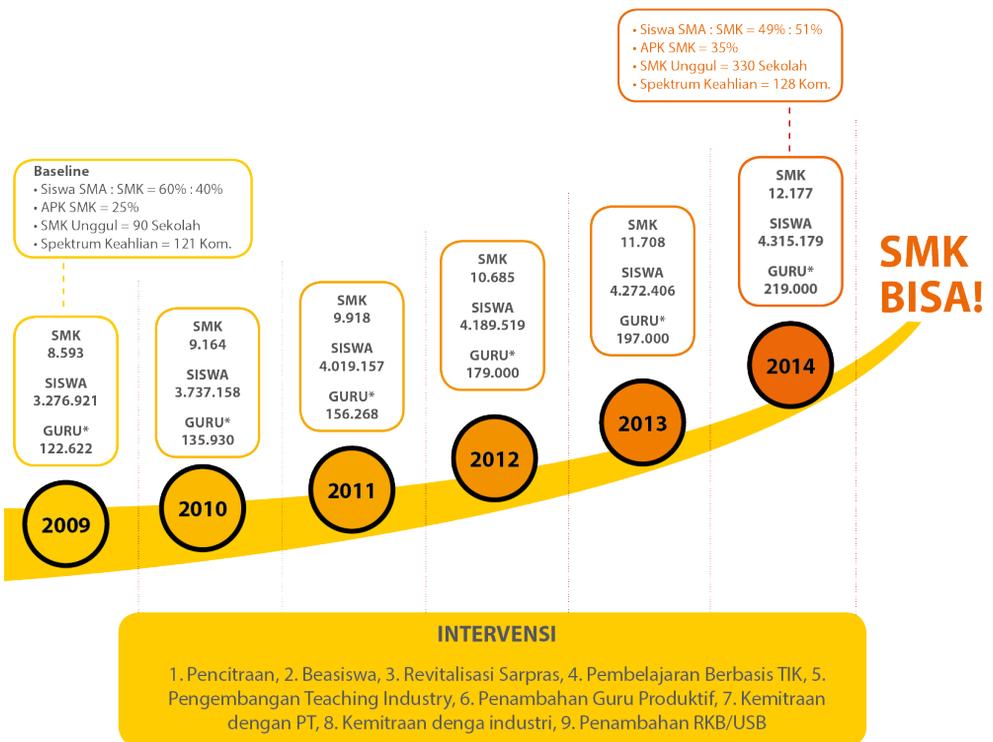
RPJMN - I (2005-2009)	RPJMN - II (2009-2015)	RPJMN - III (2015-2019)	RPJMN - IV (2020-2024)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang baik	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK	Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN			
2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024
Peningkatan Kapasitas, dan Modernisasi	Penguatan Pelayanan	Daya Saing Regional	Daya Saing Internasional

Tabel 1. Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2024

Pembangunan SMK ke depan tidak dapat dilepaskan dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah (khususnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan) bersama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti: 1. Beasiswa; 2. revitalisasi sarpras; 3. pembelajaran berbasis TIK; 4. pengembangan teaching industry; 5. penambahan guru produktif; 6. kemitraan dengan Perguruan Tinggi;

7. kemitraan dengan industri; 8. penambahan RKB/USB; dan 9. peningkatan citra SMK, telah menghasilkan sejumlah capaian sebagai dampak langsung berbagai upaya perbaikan tersebut. Gambar dibawah menunjukkan capaian pembangunan SMK dalam periode 2010-2014.



Dalam periode 5 tahun, pertumbuhan populasi SMK mencapai lebih dari 3.000 SMK baru yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan siswa sekolah menengah dan khususnya siswa SMK sebesar lebih dari 1 juta siswa. Dengan pertumbuhan yang signifikan tersebut konfigurasi siswa SMA dibandingkan dengan SMK bergeser dari 60% siswa SMA : 40% siswa SMK menjadi 49% siswa SMA : 51% siswa SMK. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan bangsa Indonesia

yang hingga saat ini harus memperbaiki struktur tenaga kerja yang selama ini dominan pendidikan dasar menjadi pendidikan menengah. Dengan meningkatnya calon tenaga kerja yang berasal dari SMK, Indonesia tidak saja mendapat lebih banyak calon tenaga kerja yang berasal dari pendidikan menengah namun mendapatkan pula calon tenaga kerja yang siap pakai. Namun demikian kinerja pembangunan tersebut belum membuat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berpuas diri karena masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan ke depan. Berikut dijabarkan perkembangan populasi SMK saat ini.

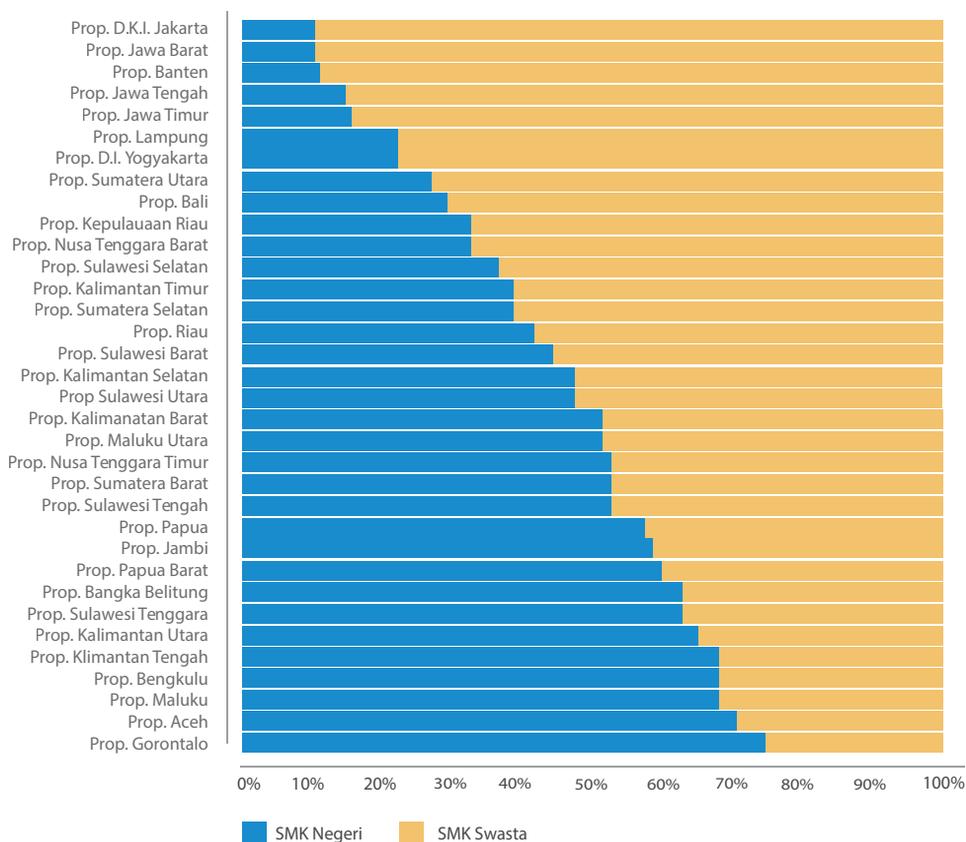
3. Perkembangan Populasi SMK

Hingga awal tahun 2015, jumlah SMK di Indonesia sudah mencapai 12.696 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 4,33 juta siswa. Dengan populasi yang demikian besarnya, seluruh SMK tersebut memberikan layanan pendidikan kepada 143 ribu rombongan belajar atau 11,27 rombel per SMK atau rata-rata 3 rombel per tingkat dengan total paket keahlian mencapai 33.000 paket atau rata-rata 3 paket keahlian per SMK.

No	Aspek	Jumlah
1	Jumlah SMK	12.696
2	Jumlah Total Paket Keahlian di SMK	33.148
3	Jumlah Rombel di SMK	143.034
4	Jumlah Workshop/RPS di SMK	27.626
5	Total Kebutuhan Workshop/RPS SMK	99.444
6	Rata-rata Paket Keahlian di setiap SMK	2,61
7	Rata-rata Rombel di SMK	11,27
8	Rata-rata Workshop/RPS di setiap SMK	2,18
9	Jumlah Siswa SMK TP 2014/2015	4,33 juta

Sumber: Dit. PSMK tahun pelajaran 2014/2015

Bila ditinjau dari jumlah siswa per rombel, saat ini SMK mencapai 1 rombel banding 30.27 siswa atau sudah lebih tinggi dari batas ideal dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu 1 rombel banding 28 siswa. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SMK sangatlah tinggi. Dari total populasi SMK yang ada saat ini 73,9% adalah SMK yang didirikan oleh masyarakat dan hanya 26,1% yang didirikan oleh pemerintah. Pada Gambar 1.4 di bawah ini ditunjukkan distribusi SMK negeri dan SMK swasta pada setiap provinsi di Indonesia.

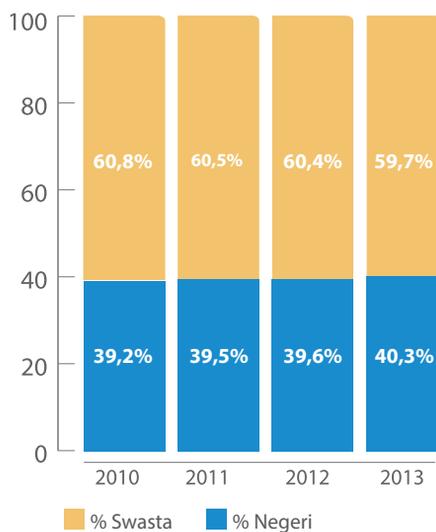
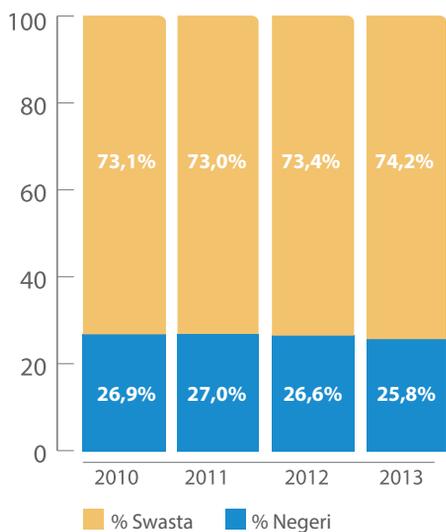


Gambar 1.4 Distribusi SMK berdasarkan Status per Provinsi Pada Tahun 2014/2015

Sumber: Dit. PSMK tahun pelajaran 2014/2015

Tingginya minat masyarakat dalam mendirikan SMK seperti dijelaskan sebelumnya ternyata belum secara signifikan mendorong minat lulusan SMP/MTs masuk ke SMK swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan pada gambar 1.5 distribusi jumlah siswa berdasarkan jenis status penyelenggaraan SMK.

Fakta yang menarik adalah dengan populasi SMK negeri yang hanya 25,8% dari total SMK pada tahun 2013, jumlah siswa SMK mencapai 40,3%. Dengan populasi siswa yang jauh lebih besar dari pada distribusi sekolah membuat rata-rata SMK negeri memiliki rata-rata siswa mencapai lebih dari 530 siswa per sekolah atau 14,9 rombel per sekolah (5 rombel per tingkat). Sementara SMK swasta hanya memiliki rata-rata siswa 278 siswa per sekolah atau 7,7 rombel per sekolah.



		2010	2011	2012	2013
Jumlah Sekolah	Negeri	2,462	2,674	2,841	3,025
	Swasta	6,702	7,244	7,844	8,683
	Total	9,164	9,918	10,685	11,708
Jumlah Siswa	Negeri	1,338,318	1,471,003	1,567,751	1,627,266
	Swasta	2,072,882	2,255,217	2,393,273	2,413,331
	Total	3,411,200	3,726,220	3,961,024	4,040,597
	% Negeri	39.2%	39.5%	39.6%	40.3%
	% Swasta	60.8%	60.5%	60.4%	59.7%
Rasio Siswa-Sekolah	Negeri	544	550	552	538
	Swasta	309	311	305	278
	Total	372	376	371	345
Rasio Rombel-Sekolah	Negeri	15.1	15.3	15.3	14.9
	Swasta	8.6	8.6	8.5	7.7
	Total	10.3	10.4	10.3	9.6

Gambar 1.5 Distribusi Jumlah Siswa SMK berdasarkan Status

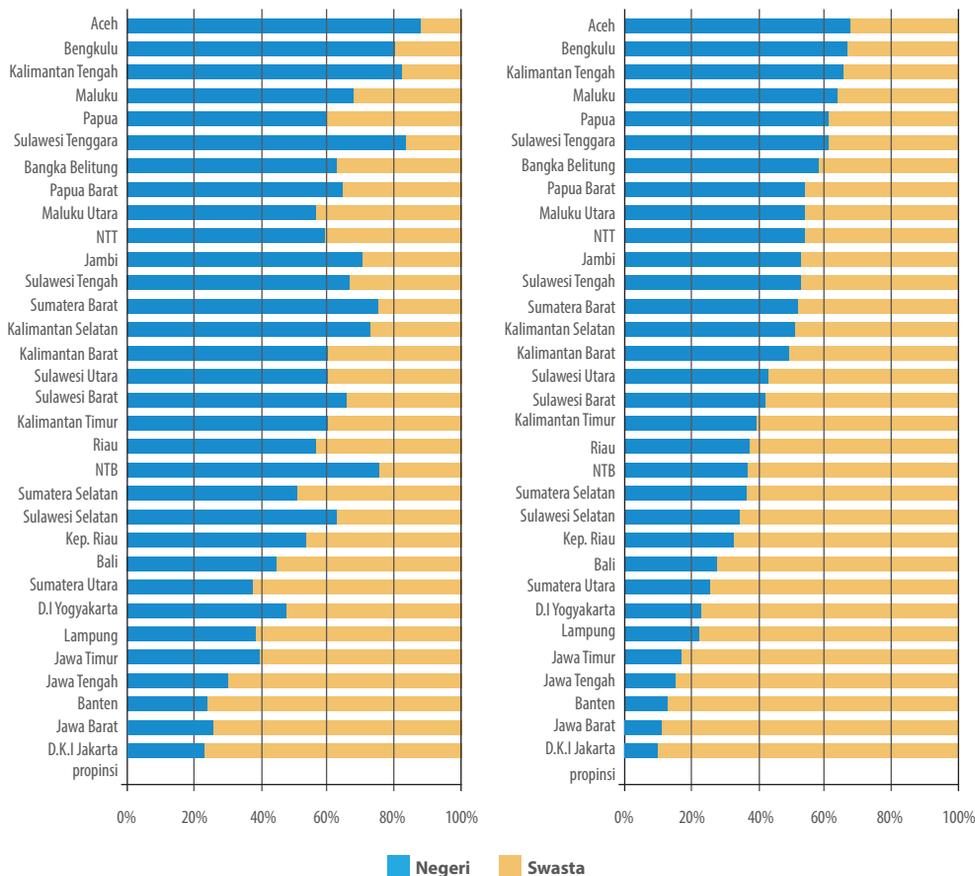
Sumber: Dit. PSMK tahun 2010-2013

Situasi ini perlu dicermati lebih lanjut karena pengembangan SMK negeri baru di setiap provinsi belum tentu berdampak pada peningkatan akses pendidikan menengah namun yang terjadi adalah penurunan minat lulusan SMP/MTs masuk ke SMK swasta dan lebih memilih masuk ke SMK negeri. Dampak yang terjadi adalah banyak SMK swasta yang justru kekurangan siswa atau bahkan berpotensi tutup atau “mati” dikarenakan kesulitan menarik siswa.

Secara umum di seluruh provinsi menunjukkan fenomena yang sama dengan kondisi nasional. Dengan demikian pemerintah menyadari bahwa penyediaan SMK baru perlu dikaji lebih jauh implikasinya terhadap serapan lulusan SMP/MTs di setiap wilayah untuk mencegah minimnya peningkatan akses masyarakat ke pendidikan SMK dikarenakan kalah bersaingnya SMK swasta dibanding dengan SMK negeri.

Distribusi Jumlah Siswa SMK Negeri & Swasta per Provinsi

Distribusi Jumlah SMK Negeri & Swasta per Provinsi



Gambar 1.6 Perbandingan jumlah SMK dan Jumlah Siswa SMK berdasarkan Status Sekolah per Provinsi

Sumber: Dit. PSMK Dit. PSMK tahun pelajaran 2014/2015

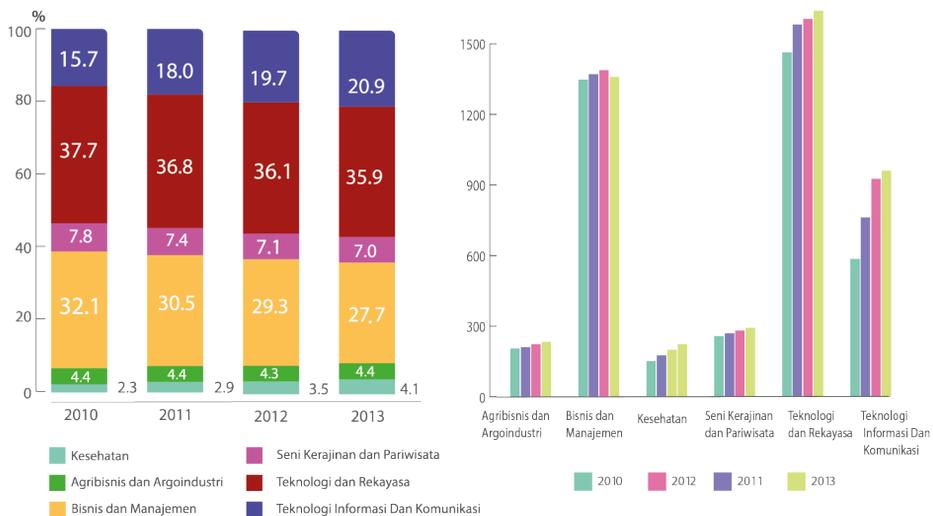


SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroindustri

Foto : Dokumentasi Dit. PSMK

Tren siswa SMK bidang keahlian Agribisnis dan Agroindustri mengalami tren yang konstan dari tahun 2010-2013. Pertumbuhan yang konstan ini menandakan bahwa potensi pertanian Indonesia belum menarik bagi lulusan SMP/MTs. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan khusus untuk meningkatkan animo tersebut mengingat bahwa Indonesia masih sangat kekurangan tenaga terampil bidang keahlian Agribisnis dan Agroindustri.

Fakta menarik lainnya ditunjukkan pula pada sebaran siswa berdasarkan bidang keahlian, Jika kita perhatikan tren dari 2010-2013 dapat diketahui bahwa terdapat tren menurun hampir pada setiap bidang keahlian kecuali bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bidang Keahlian Kesehatan dengan peningkatan $\pm 1-2\%$ per tahun. Kenaikan animo lulusan SMP/MTs terhadap bidang TIK dan kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pasar terhadap lulusan SMK bidang TIK dan kesehatan yang semakin meningkat.



Gambar 1.7 Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK berdasarkan Bidang Keahlian
Sumber: Dit. PSMK tahun 2010-2013

Sedangkan tren pertumbuhan menurun tampak pada bidang keahlian seni, Kerajinan dan Pariwisata; Bisnis dan Manajemen; dan Teknologi dan Rekayasa. Tren turun yang sangat signifikan terjadi pada bidang keahlian Bisnis dan Manajemen sejak tahun 2010 – 2013 turun sebesar hampir 5%. Penyebab penurunan tersebut diantaranya pasar sudah mulai jenuh dengan lulusan bisnis dan manajemen dan juga adanya dampak dari proses reengineering yang dilakukan di SMK yang bertujuan untuk menyesuaikan kembali distribusi bidang-bidang keahlian di SMK sesuai dengan kebutuhan pasar.



SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen
Sumber: Dokumentasi Dit. PSMK



Gambar 1.8 Perkembangan Animo Pendaftar ke SMK
Sumber: Dit. PSMK tahun 2009-2014

Pada gambar 1.8 di atas dapat diketahui bahwa Pada setiap tahunnya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terdapat hampir 500 ribu lulusan SMP/MTs yang tidak dapat tertampung masuk ke SMK. Hal ini disebabkan masih terbatasnya daya tampung SMK dibandingkan dengan animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMK. Oleh karena itu penambahan daya tampung masih dianggap perlu ditingkatkan tanpa harus mengalahkan peningkatan mutu SMK itu sendiri.

Dengan berbagai karakteristik di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan harus menciptakan formulasi strategi kebijakan yang sesuai agar seluruh SMK dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam memajukan pendidikan menengah di Indonesia.

4. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/ Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.





Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawa Cita, memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah: Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya dengan baik apa yang disebut sebagai tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah:

1. Sekolah yang kondusif. Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan dalam membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan

lingkungannya. Sekolah yang kondusif menjadikan sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting adalah Kepala Sekolah yang memimpin para pelaku menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai penyemangat. Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.
3. Orang tua yang terlibat aktif. Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya dan terus berlanjut meskipun mereka sudah masuk sekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberi masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat



- aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif.
4. Masyarakat yang sangat peduli. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya adalah keterbatasan sumber daya Pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan sendiri atau mendukung satuan pendidikan milik Pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan sendiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Masyarakat kini bisa memiliki peran serta dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah.
 5. Industri yang berperan penting. Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting adalah dalam memecahkan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri bisa berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan.

Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang mereka perlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar. Organisasi profesi diharapkan bisa meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberi masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Pemerintah yang berperan optimal. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat) yang dilaksanakan pada tahun 2002 yaitu tentang pendidikan maka bentuk dukungan pemerintah diantaranya telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional".



Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten dan kota serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian cukup besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain dengan mengkaitkan alokasi dana Pemerintah dihubungkan dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.



Siswa SMK Negeri 1 Mundu Cirebon
Sumber: Dokumentasi Dit. PSMK

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai: [1] Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; [2] Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air; [3] Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; [4] Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible) [5] Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia; [6] Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak; [7] Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, dan keinginan saling tolong menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, maka ditetapkan 5 (lima) Misi yang merupakan rumusan umum dari upaya-upaya pencapaiannya. Misi tersebut adalah:

Kode	Misi
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut: [1] Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian; [2] Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan

capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); [3] Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi; [4] Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; [5] Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu: [1] Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian; [2] Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta



vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak; [3] Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak; [4] Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar; [5] Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak; [6] Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah; [7] Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Sejalan dengan semangat integrasi antara unit kerja di dalam Kementerian, Visi dan Misi Kementerian merupakan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

5. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMK

Sejalan dengan visi dan misi kemdikbud 2015-2019, berikut rumusan visi dan misi Direktorat Pembinaan SMK ke depan.

Visi Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019: “Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMK yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Direktorat PSMK 2015-2019:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan
4. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Fokus Pengembangan SMK Menuju 2020

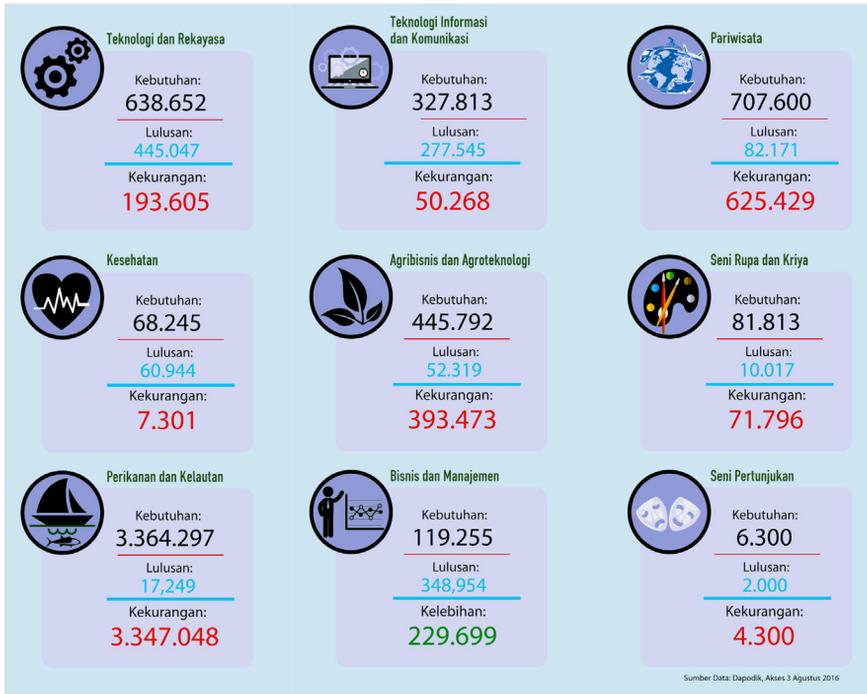
Percepatan pembangunan pendidikan vokasi lewat SMK difokuskan pada potensi besar yang dimiliki Indonesia. Bidang kemaritiman yang terdiri dari perikanan dan kelautan, bidang pariwisata, bidang pertanian serta bidang industri kreatif adalah lima sektor unggulan yang jika potensinya diolah dengan baik dapat membuka peluang usaha dan bursa tenaga kerja siap pakai.

Dalam menyiapkan lulusan terampil dan kompeten dari SMK, pemerintah menambah fasilitas belajar dengan menambah unit sekolah baru, ruang kelas baru dan sarana prasarana pendukung lainnya. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Kemendikbud, Mustaghfirin Amin mengatakan “Jadi perkembangannya bisa kita lihat, di 2010 jumlah SMK sepuluh ribuan, sekarang sudah 13 ribuan”, katanya di Jakarta, Agustus 2016.

Di samping itu, pemerintah melakukan inventarisasi dan identifikasi unsur potensi yang dimiliki hingga kebutuhan infrastruktur dan pembinaan. Di bidang kemaritiman misalnya, pemetaan percepatan pembangunan bidang kemaritiman didukung dengan identifikasi dan inventarisasi industri dan jasa maritim. Industri berbasis kelautan yang telah diinventarisasi antara lain industri perikanan, industri berbasis potensi sumber daya lokal, industri pariwisata bahari, industri jasa transportasi dan perdagangan.

Ada juga pengembangan 450 SMK unggulan di bidang maritim melalui dukungan untuk ruang kelas dan ruang bengkel, pembaruan peralatan, teaching factory dan asrama.

“Sebagai bagian dari program pembinaan, Direktorat Pembinaan SMK sudah memfokuskan pada 4 (program) prioritas, yakni SMK Kemaritiman, SMK Ketahanan Pangan, SMK Pariwisata dan SMK Industri Kreatif.”



Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK Tahun 2016
Sumber : Data Dapodik, Akses 3 Agustus 2016

Dukungan pembinaan untuk semua bidang dimulai dari revitalisasi SMK yang ada, termasuk penambahan program di SMK. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk membangun unit sekolah baru (USB) SMK didaerah dengan potensi tinggi. Untuk penguatan kelembagaan, tata kelola institusi, sertifikasi lulusan dan peningkatan kebecerjaan, dibangun sektor kewirausahaan yang berbasis keunggulan lokal.

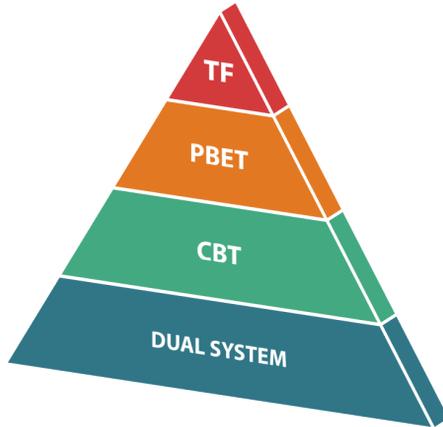
Di bidang pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata didasarkan pada preferensi, analisis perilaku, psikografik serta tarikan pasar. Untuk itu, merevitalisasi program keahlian di SMK Pariwisata dilakukan agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu industri pariwisata.

Lulusan SMK secara umum diharapkan dapat mendorong melibatkan peran aktif dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wilayah setempat. Dengan demikian, keberadaannya dapat memberikan manfaat dan keberlanjutan sumber daya yang ada.

Pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah melibatkan berbagai pihak (lintas sektor). Kerjasama antar Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Daerah (PEMDA) terus dilakukan. Keberadaan SMK yang berada di wilayah kerja pemerintah daerah memerlukan peran aktif dan keseriusan PEMDA untuk benar benar menganalisis kebutuhan dan peta SMK yang berada didaerahnya. Dari analisis tersebut, arah pembangunan sebuah wilayah dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Selanjutnya untuk menyiapkan lulusan SMK berjiwa wirausaha yang siap kerja, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global maka dibuatlah sebuah grand design atau rencana pengembangan *Teaching Factory* dan *Technopark* yang disusun dengan tujuan ; [1] memetakan kondisi pengembangan *Teaching Factory* dan *Technopart* SMK di semua Provinsi di Indonesia; [2] Strategi pelaksanaan program pengembangan *Teaching Factory* dan *Technopark* SMK pada tingkat Nasional; [3] Rekomendasi pelaksanaan program pengembangan *Teaching Factory* dan *Technopark* SMK di setiap Provinsi disesuaikan dengan kondisi internal dan kondisi eksternal pendidikan menengah di masing-masing provinsi.

Konsep Teaching Factory SMK



Konsep *Teaching Factory* merupakan suatu metode pembelajaran yang mampu mengantarkan siswanya mencapai kompetensi standar industri melalui tahapan proses pencapaian standar penguasaan motorik, kognitif, dan afektif dan memunculkan hasil belajar perilaku inspiratif – intuitif yang secara akademis didiskripsikan sebagai pembelajaran karakter.

Teaching Factory (TF) memiliki nilai strategis pada pendidikan dan pelatihan kejuruan dalam meningkatkan daya saing lulusan institusi kejuruan seperti SMK di pasar tenaga kerja tingkat lokal maupun nasional bahkan regional, karena mempunyai mekanisme yang selalu mengikuti perkembangan industri yang sangat cepat.

Pengkategorian pelaksanaan *Teaching Factory* (TF) seperti tertera pada gambar di atas sangat berguna dalam pemetaan pembinaan SMK. Karena hal ini berkaitan dengan kesiapan SMK di Indonesia yang sebagian besar masih belum mampu untuk mengimplementasikan *Teaching Factory* secara langsung sehingga untuk mengawalinya memerlukan program penguatan kompetensi dengan pembelajaran yang berbasis produksi, dilanjutkan dengan implementasi *Teaching Factory*. Konsep inilah yang nantinya akan menghasilkan lulusan yang memiliki perilaku industri yakni kompeten, produktif, dan kompetitif.

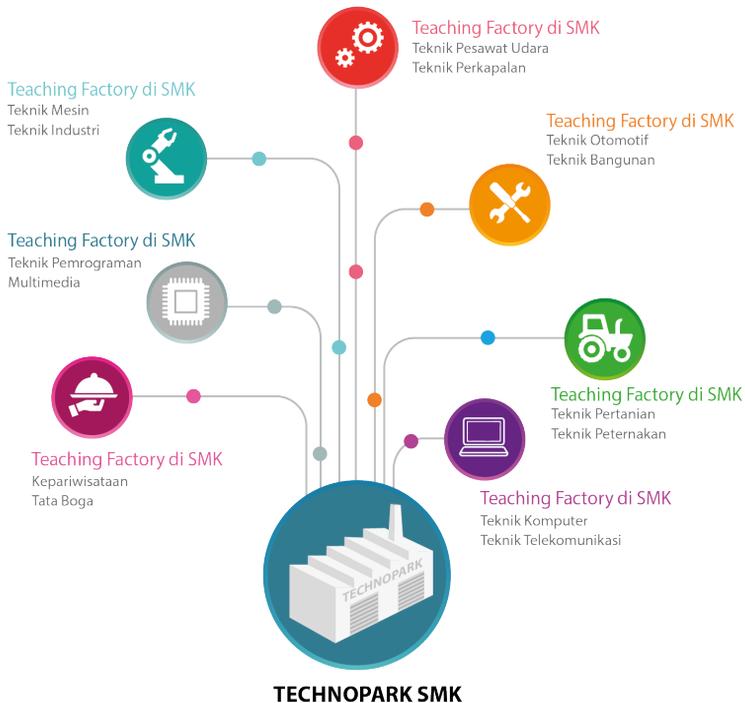
Konsep Technopark SMK

Technopark SMK merupakan salah satu bentuk wadah (integrator) untuk menghubungkan antara SMK-SMK yang telah melaksanakan program *Teaching Factory* dengan dunia industri. *Technopark* bertujuan untuk merangsang dan mengelola arus pengetahuan dan teknologi sesama SMK pelaksana program *Teaching Factory*; memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan pendukung industri berbasis inovasi melalui inkubasi bisnis dan proses spin-off, dan menyediakan layanan peningkatan nilai tambah lainnya, melalui penyediaan ruang dan fasilitas berkualitas tinggi pendukung

Technopark memiliki beberapa fasilitas, antara lain inkubator bisnis, *angel capital*, *seed capital*, *venture capital*. *Stakeholder* dari suatu *technopark* SMK biasanya adalah pemerintah (biasanya pemerintah daerah), komunitas peneliti (akademis), komunitas bisnis dan finansial. *Stakeholder* bekerjasama untuk mengintegrasikan penggunaan dan pemanfaatan bangunan komersial, fasilitas riset, *conference center*, sampai ke hotel. Bagi pemerintah daerah, *Technopark* SMK menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Bagi para pekerja yang berpendapatan cukup tinggi, *Technopark* SMK memiliki daya tarik karena situasi, lokasi dan lifestyle.



Technopark SMK mencoba menggabungkan ide, inovasi, dan *know-how* dari berbagai SMK pelaksana *Teaching Factory* dan kemampuan finansial (dan marketing) dari dunia bisnis. Diharapkan dari penggabungan ini dapat meningkatkan dan mempercepat pengembangan produk serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan inovasi ke produk yang dapat dipasarkan, dengan harapan untuk memperoleh *economic return* yang tinggi.



Dokumentasi Kegiatan Praktik Siswa SMK Tahun 2014-2015

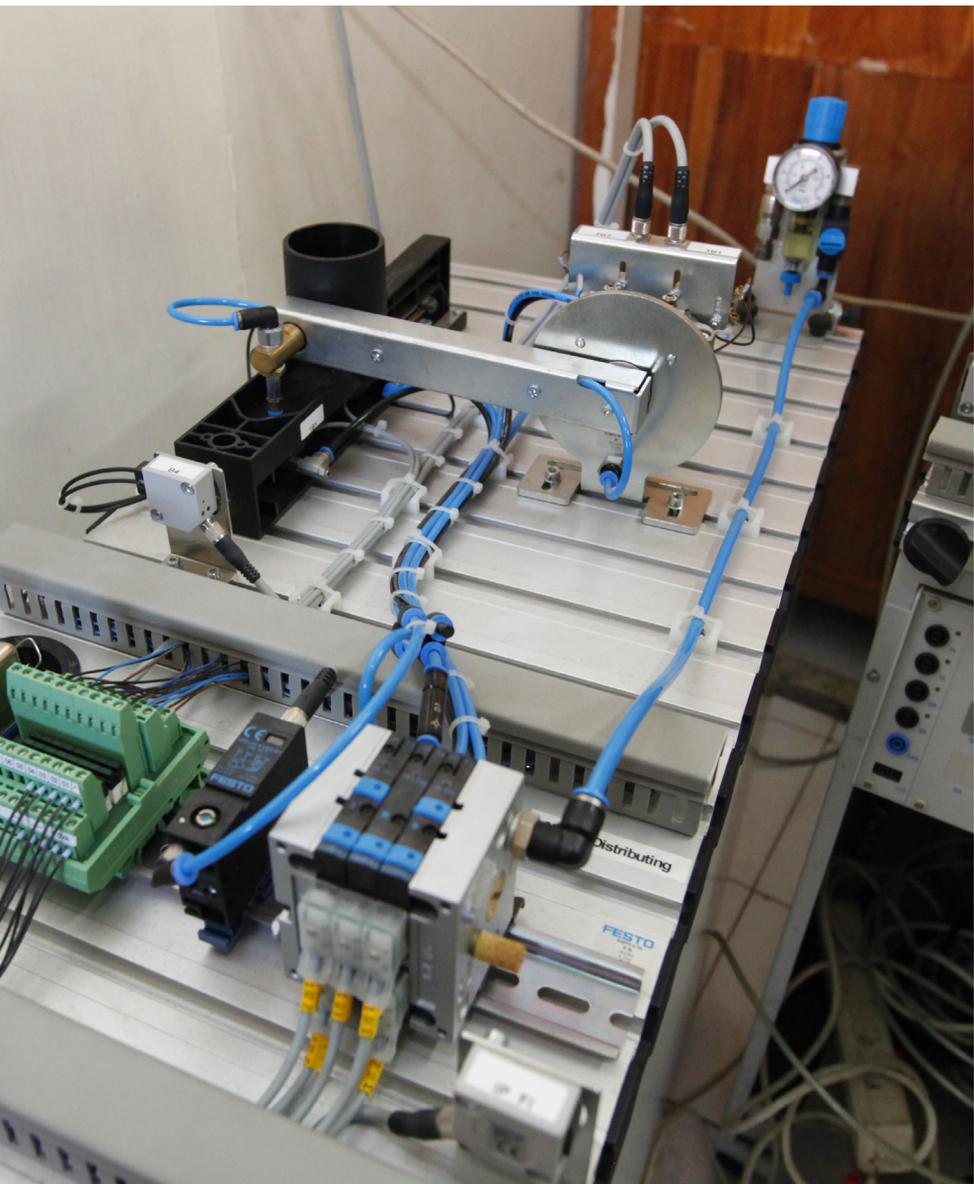


Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta



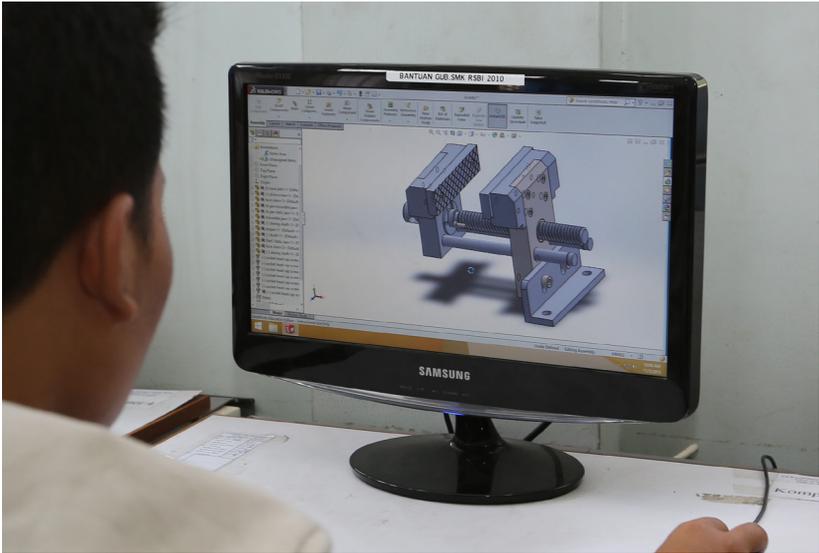


Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta





Kegiatan Praktik siswa SMK Mikael Surakarta





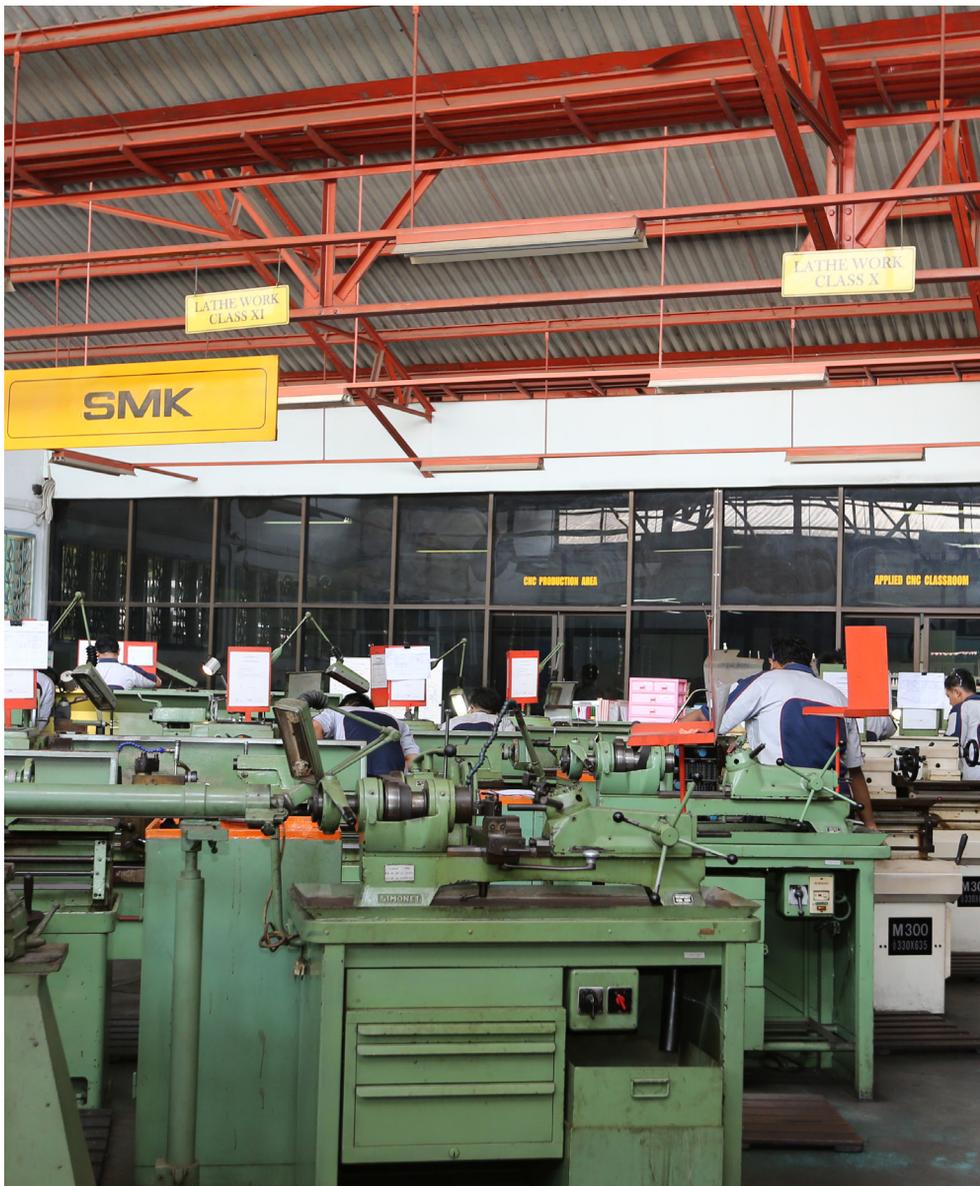


Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta



Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 4 Jakarta





Kegiatan Praktis siswa SMK Mikael Surakarta





Kegiatan Praktik siswa SMK Mikael Surakarta





Kegiatan Praktik siswa SMK





Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta



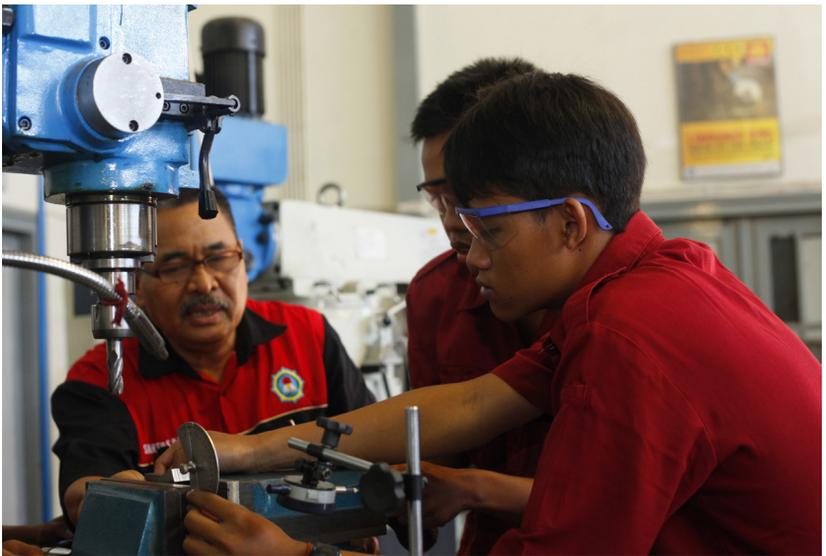


Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta





Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta





Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta





Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta





Kegiatan Praktik siswa SMK Negeri 1 Pacet







Produk SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi (SMK Negeri 1 Pacet)



F & B service



Produk SMK Bidang Keahlian Pariwisata (SMK Negeri 27 Jakarta)



LAMPIRAN



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 September 2016

Nomor : B. 772-/PMK/9/2016
Kepada Yth.
Sifat : Segera
Daftar Menteri dan Kepala Lembaga
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Terlampir
Perihal : Penyampaian salinan Instruksi
di
Presiden Nomor 9 Tahun 2016
Jakarta

Bersama ini dengan hormat disampaikan salinan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Sekretariat Kabinet,




Surat Indrijarso

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet; dan
2. Wakil Sekretaris Kabinet.

Jalan Veteran No.18, Jakarta 10110



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT

Nomor : B.772/PMK/9/2016

Tanggal : 13 September 2016

**DAFTAR MENTERI, KEPALA LEMBAGA, DAN GUBERNUR YANG MEMPEROLEH
SALINAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016**

Kepada Yth.:

A. Menteri Kabinet Kerja

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
12. Menteri Kesehatan.

B. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

C. Para Gubernur

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
5. Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Gubernur Provinsi Lampung;
8. Gubernur Provinsi Aceh;
9. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
10. Gubernur Provinsi Riau;
11. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
12. Gubernur Provinsi Jambi;
13. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
14. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
15. Gubernur Provinsi Bengkulu;

Jalan Veteran No.18, Jakarta 10110



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

16. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Gubernur Provinsi Bali;
18. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
21. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
24. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
25. Gubernur Provinsi Gorontalo;
26. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
27. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
28. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Gubernur Provinsi Maluku;
32. Gubernur Provinsi Maluku Utara;
33. Gubernur Provinsi Papua; dan
34. Gubernur Provinsi Papua Barat.

Jalan Veteran No.18, Jakarta 10110



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA
INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
 2. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
 3. Para Gubernur;

Untuk :

- PERTAMA** :
1. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia; dan
 2. menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - a. membuat peta jalan pengembangan SMK;
 - b. menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*);

c. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -

- c. meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
 - d. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri;
 - e. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan
 - f. membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk:
- a. mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan
 - b. mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK.
3. Menteri Perindustrian untuk:
- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
 - b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
 - c. mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur; dan
 - d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
4. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Menteri Ketenagakerjaan untuk:
 - a. menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu;
 - b. memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja di Balai Latihan Kerja (BLK);
 - c. melakukan revitalisasi BLK yang meliputi infrastruktur, sarana prasarana, program pelatihan, dan sertifikasi; dan
 - d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
5. Menteri Perhubungan untuk:
 - a. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang perhubungan;
 - b. meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan perhubungan;
 - c. memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang, termasuk berbagi sumber daya (*resources sharing*); dan
 - d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
6. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:
 - a. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan kelautan dan perikanan;
 - c. memberikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang; dan
 - d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
- a. mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyerap lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SMK;
 - b. mendorong BUMN untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
 - c. mendorong BUMN untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur.
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
- a. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi industri energi yang terkait dengan lulusan SMK;
 - c. mendorong industri energi untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
 - d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
9. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9. Menteri Kesehatan untuk:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi fasilitas kesehatan yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
- c. memberikan kesempatan yang luas kepada lulusan SMK bidang kesehatan untuk bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; dan
- d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

10. Menteri Keuangan untuk:

- a. menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengelolaan keuangan *teaching factory* di SMK yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- b. melakukan deregulasi peraturan yang menghambat pengembangan SMK.

11. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk:

- a. mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK;
- b. mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK; dan
- c. mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.

12. Para...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

12. Para Gubernur untuk:

- a. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing;
- b. menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
- c. melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; dan
- d. mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

KETIGA : Menteri, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Gubernur melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Surat Indrijarso



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. & Surjomihardjo, A. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta: Gramedia>
- Achmad, Z.A. (1998). *Momerandum Akhir Masa Jabatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 1993-1998*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Adler, M.J. (1982). *The Paidea Proposal: An Educational Manifesto*. Newyork: Collier.
- Andono. (1994). *Penyederhanaan Program Pendidikan Keterampilan*. Jakarta: Direktorat Dikmenjur.
- Atkinson, R.D. (2001). *The New Growth of Economics. Progressive Policy Institute. [Online]. Aavailable at <http://www.ppionline.org>*.
- Bagian Proyek Program Keterampilan pada SLTP. (1995). *Bulletin Program Keterampilan pada SLTP*. Edisi November 1995.
- Beeby, C.E. (1981). *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan pedoman Perencanaan*. Jakarta: LP3ES.
- Birowo, A.T. (1981). *Pengembangan Konsepsi ke Arah Peningkatan Relevansi Pendidikan Menengah Pertanian*. Jakarta: Pusdiklat Deptan.
- BP3K. (1975). *Pendidikan di Indonesia, 1900-1974*. Jakarta: BP3K Dekdikbud.

- Carnevale, A.P. & Porro, J.D. (1994). *Quality Education: School Reform for the New American Economy*. Washington D.C. U.S. Department of Education.
- Colombo Plan. (1976). *Technical Cooperation under the Colombo Plan*. Colombo; The Colombo Plan Bureau.
- De Graft, H.J. (1949). *De Geschiedenis van Indonesie*. Amsterdam: van Hoeve.
- Dekdikbud. (1994). *Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tenggala Landas*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. (1996). *Lima Puluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. (1984). *Buku Kurikulum SMKTA Pertanian*.
- Depdikbud. (1993). *Program keterampilan pada SMP*. Jakarta : Pokja Pemasarakatan Kebijakan Kemdikbud.
- Depdikbud. (1994). *Buku Kurikulum SMK Pertanian*.
- Depdikbud. (1996). *Buku Kurikulum SMK Pertanian*.
- Depdikbud. (1999). *Buku Kurikulum SMK Pertanian (Modifikasi Kurikulum 1996)*. Jakarta: Direktorat Dikmenjur.
- Depdikbud, (2002) *Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020*. Jakarta: Dit. Dikmenjur.
- Direktorat Dikmenjur. (1977a). *Pola Induk STM Pembangunan Bagian Pertanian Temanggung*.
- Direktorat Dikmenjur. (1977b). *Laporan Penataran Guru STM Pertanian Kerjasama UNESCO, Jepang, dengan Ditjen Dikdasmen dan Fakultas Mekanisasi dan Teknologi Pertanian IPB*.



- Direktorat Dikmenjur. (1981). *Program Pendidikan Diploma III Sistem Lapis Pendidikan Guru Kejuruan Pertanian*. Bogor: Politeknik Pertanian IPB.
- Direktorat Dikmenjur. (1993). *Buku Repelita V Direktorat Dikmenjur*. Jakarta: Direktorat Dikmenjur; Ditjen Dikdasmen.
- Direktorat Dikmenjur. (1998). *Laporan Perkembangan Penataran Guru STM/SMT Pertanian Pelita VI*. Cianjur: PPPG Pertanian.
- Direktorat Dikmenjur. (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia ; Membangun Manusia Produktif*. Jakarta. Ditjen Dikdasmen
- Ditjen Dikdasmen. (1997). *Tumbuh Kembang Pendidikan Dasar dan Menengah 1940-1996*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Djojonegoro, W. (1997). *Link and Match: Kebijakan untuk Meningkatkan relevansi Pendidikan dengan Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud.
- DTVE. (1976). *Development of Technical and Vocational Education in Indonesia*. Jakarta: Directorate of TVE, MOEC.
- Fisher,P. (1965). *The Role of Middle Level Manpower in Social and Economic Development*. The Colombo Plan.
- Frederick, W.H. & Soeroto,S. (Eds). (1984). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- GINTIC Institute of Manufacturing Technology, NTU. (1995). *Five Year Plan 1995-1999*. Singapore.
- Hadisapoetra, S. (1997). *Pengembangan Teknologi Pedesaan*. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
- Harbison, F. & Myers, C.A. (1965). *Manpower and Education*. Newyork: McGraw-Hill.
- Hasan, S.H. (1996). *Pandangan Dasar Mengenai Kurikulum Pendidikan Sejarah*. (Pidator Pengukuhan Guru Besar di IKIP Bandung).

- IKIP Bandung. (1996). *Identifikasi Program Pendidikan Keterampilan dan Pemilihan SLTP sebagai Pelaksanaannya: Studi pada 55 Kabupaten/ Kotamadya di Indonesia*. Bagian Proyek Program Keterampilan pada SLTP.
- IKIP Surabaya. (1996). *Identifikasi Program Pendidikan Keterampilan dan Pemilihan SLTP sebagai Pelaksanaannya: Studi pada 7 Dati II di Provinsi Bali*. Jakarta: Bagian Proyek Program Keterampilan pada SLTP.
- Ismaun. (2001). *Paradigma Pendidikan Sejarah yang Terarah dan Bermakna*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Pendidikan Indonesia).
- Jalal, F. & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Jong-Ha Han. (1994). "Educational and Industrialization: The Korea Nexus in Human Resource Development." *Education Economics*.
- Kartodirdjo, S. et. al. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. (1997). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Kurniawan, Arie Wibowo (2016). *Grand Design Pengembangan Teaching Factory dan Technopark di SMK*
- KEMENDIKBUD (2016). "Fokus Pengembangan SMK di Lima Sektor Unggulan". *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi V, September 2016
- KEMENDIKBUD (2015). "Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2016"



- Lecht, L.A. (1969). *Manpower Needs for National Goals in the 1970s*. New York: Frederick A. Praeger.
- Leirissa, R.Z. (1985). *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950: Terwujudnya Suatu Gagasan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lim Ho Hup. (1969). *Manpower Development and technical Education. The Colombo Plan Intra-Regional Technical Education Colloquium*.
- Lin Yutang. (1949). *The Wisdom of China and India*. New York: Modern Library.
- Mahler, F. (1971). *National Development, Manpower and Technical Training Objectives*.
- Middleton, J. & Demsky, T. (1989). *Vocational Education and Training: A Review of World Bank Investment*. Washington, D.C. : Word Bank.
- Milss, H.R. (1865). *Middle Level Manpower in Social and Economic Development*. Singapore: The Colombo Plan.
- MOEC. (1996). *Education Development in Indonesia : A Country Report*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- MOEC. (1997). *Indonesia Education Statistic in Brief 1995/1996*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Ohmae, K. (1987). *Beyond National Borders: Reflections on Japan and the World*. Homewood, Illinois: Dow Jones Irwin.
- Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Poespoprodjo, W. (1987). *Subjektivitas dalam Historiografi*. Bandung: Remadja Karya.
- Satari, G., Atmadilaga, D., & Suwardi, H. (1974). *Inventarisasi Teknologi Tepat Guna dalam Bidang Pertanian di Desa*. Makalah

- Seminar Penerapan Teknologi dalam Pertumbuhan dan Pengembangan Desa*. Bandung: UNPAD.
- Soedijarto, (2008) *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: PT Media Indonesia, . ,
- Sayuti, H. (1982). *Sejarah Pendidikan Daerah Lampung*. Jakarta: Depdikbud.
- Scott, ID. (1974). *Report on Technical Vocational Education in the Department of Education and Culture, Republic of Indonesia*. Jakarta: Direktorat PMK.
- Seskoad. (1989). *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta; Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Bandung: Seskoad.
- Setneg. (1994). *Buku Putih Peristiwa G-30 S PKI*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sitarama Rao, S.K. (1976). *Curriculum Development: Some Ideas*. Singapore: The Colombo Plan Staff College for Technical Education.
- Situmorang, A,O.B. (1986). *Kepekaan Pendidikan Pertanian Tingkat Menengah*. Jakarta: Direktorat Dikmenjur.
- Soewargana, Oejeng. (1969). *Pendidikan: Prasarana dari Semua Prasarana Pembangunan*. Bandung: Ganaco.
- Sukardi, H. et. al. (1986). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Depdikbud.
- Sundaram, K.N. (1965). *Elements of a Manpower Programme for Developing Countries: Skilled Manpowers*. The Colombo Plan Intra-Regional Technical Education Colloqium.
- Supriadi, D. (1997). *Pelaksanaan Program Keterampilan di SLTP dan Pendidikan Sistem Ganda di SMK : Pengamatan terhadap Beberapa Sekolah*. Jakarta: Direktorat Dikmenjur.



- Supriadi, D. (1999). *Pengantar Pendidikan Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Supriadi, D. (2001). *Studi Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU, dan SMK*. Jakarta : Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Depdiknas.
- Syamsuddin, H. (1996). *Sejarah Pendidikan: Cinderella dalam pengajaran dan Historiografi Indonesia?* (Pidato Pengukuhan Guru Besar di IKIP Bandung)
- Syamsudin, H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1996)*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Tiemmann, R., Scholz, J., & Thies, C. (2000). *The Global Trend of Automotive Industry Year 2000-2010*. World Automotive Congress. Seoul, Korea.
- UNDP. (1996). *Human Development Report 1996*. New York: UNDP.
- UNDP. (1997). *Human Development Report 1997*. New York: UNDP.
- Van der Wal, S.L. (1963). *Het Onderwijs-beleid In Nederlands-Indie, 1900-1940 (kebijaksanaan Pendidikan di Hindia-Belanda 1900-1940)*. Alih bahasa oleh Sumarsono Mestoko dan Achmad Dasuki (1997). Jakarta: BP3K.
- Verspoor, A.M. (1989). *Pathways to Change: Improving the Quality of Education in Developing Countries*. World Bank Discussion Paper No.53. Washington, D.C. : World Bank.
- Waliono, H. (1993). *Memorandum Akhir Masa Jabatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 1985-1993*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Waltari, M.(n.d) *Sinuhe, de Egyptenaar*. Van Holkema & Warendorf, N.V. Amsterdam
- Winarno, F.G., Syarif, R. & Gardjito. (1997). *Teknologi Pedesaan*. Bogor : Fatemata IPB.
- Wiriaatmadja, R. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Press.

World Bank. (1993). *The East Asian Miracle: Economics Growth and Public Policy*. Washington, D.C: World Bank.

World Bank. (1994). *Indonesia: Stability, Growth, and Equity in Repelita VI*. Washington D.C.: World Bank.

World Bank. (1996). *Training and the Labor Market in Indonesia: Policies for Productivity Gains and Employment Growth*. Washington, D.C.: World Bank.

World Bank. (1998). *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*. Education Sector Unit, East Asia and Pacific Regional Office.